

---

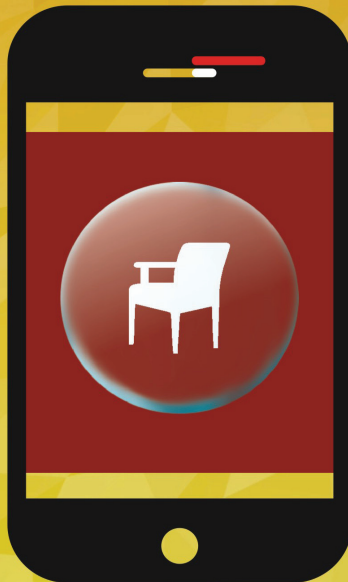
# PROSIDING

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UGM

## KONFERENSI NASIONAL SOSIOLOGI

20-22 MEI 2014

**“TRANSFORMASI DEMOKRASI INDONESIA MENUJU  
PERUBAHAN YANG BERMAKNA”**



JURUSAN SOSIOLOGI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA



APSSI  
Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia



978-602-71150-1-9



## Daftar Isi

Kata Pengantar

Pendahuluan	15
Diskusi Panel	47
Cluster 1: Etika dan Perilaku Budaya Politik (A1)	67
Cluster 2: Etika dan Perilaku Budaya Politik (A2)	105
Cluster 3: Gender dan Representasi Politik	147
Cluster 4: Konflik dan Politik Identitas	185
Cluster 5: Media, Selebritas dan Pencitraan Pemilu	239
Cluster 6: Pemuda dan Pemilih Pemula	277
Cluster 7: Pendidikan Pemilih dan Kualitas Pemilu	297

## **KONFLIK DAN POLITIK IDENTITAS :**

Islamism From Below_Abdil Mughis	799
Politik Identitas Berbasis Agama_Fitri Harahap	815
Politik Identitas Islam Dan Empat Perang Aceh_M. Nazaruddin	829
Tantangan Demokrasi Di Daerah Bekas Konflik _Fajri	881

## **MEDIA SELEBRITAS DAN PENCIPTA PEMILU :**

Demokrasi Online-Offline_Derajad S. Widhyharto.	907
Dramaturgi Aktor-Aktor Politik_Andi Burchanuddin,dkk.	933
Parodi Kampanye Pemilu di Media Jejaring Sosial_Sri Murlianti	957
Pemanfaatan Media Sosial Untuk Pemasaran Politik_ Sigit Pranawa	983
Politik Selebritas Atau Selebritas Politik _Warsisto	1003
Stand Up Comedy Menyuarakan Demokrasi Di Indonesia_Ikma Citra	1021
Teater Rakyat Media Alternatif Bagi Pemilih Marginal_Sih Natalia Sukmi	1045

# KONFLIK DAN POLITIK IDENTITAS





## POLITIK IDENTITAS ISLAM DAN EMPAT PERANG ACEH

Muhammad Nazaruddin  
Universitas Malikussaleh Aceh

### **Abstrak**

Politik identitas keacehan yang dikonsepsikan sebagai Islami selalu menjadi langgam dari setiap perjuangan yang dilakukan Orang Aceh. Reproduksi tentang paham Aceh yang islami terlihat dalam empat perang yang dijalankan Aceh; perang Aceh-Belanda, perang dalam revolusi fisik kemerdekaan Indonesia di Aceh, perang Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Aceh dan perang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Islam dan proses islamisasi yang sudah berusia sekitar 1300 tahun di tanah Aceh selalu menjadi instrumen ampuh untuk memobilisasi semangat juang rakyat Aceh dalam semua periode perang Aceh. Hal ini didasarkan pada asumsi atas dasar Islam dan demi Islamlah identitas keacehan itu dibina, dibela dan dipertahankan. Jadi tanpa Islam, Aceh tidak ada dan tentu saja memudarnya Islam sekaligus juga memudarnya Aceh. Islam sebagai pembentuk kesadaran identitas keacehan yang paling utama kemudian telah menjadi jati diri dan citra diri Orang Aceh sekaligus juga menjadi harga diri Orang Aceh telah direproduksi sebagai daya dorong dan energi sosial politik utama bagi setiap perjuangan dan perang Aceh.

Perspektif dan metode pembahasan tulisan ini dielaborasi dalam bentuk diskusi deduktif – induktif. Diskusi ini terutama didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan yang berbicara tentang empat perang yang pernah terjadi di Aceh yang di dalamnya telah berkelindan identitas keacehan yang paling azasi yaitu islam. Data-data sosial dalam konteks kekinian yang telah diamati juga ditampilkan untuk menunjukkan gejala kontinuitas historis pembahasan.

Proses ideologisasi dan sakralisasi perang telah dimulai sejak perang Aceh-Belanda pada 1873. Perang tidak lagi hanya dimaknai sebagai membela negeri tetapi menjadi perilaku spiritual dan ibadah yang disucikan. Kematian justru menjadi tujuan perang sebab di sanalah ia akan mejadi syuhada Allah untuk mendapat kehidupan bahagia yang hakiki. Berperang dalam makna ini kemudian menjadi hal yang membanggakan bagi kesadaran sebagai Orang Aceh. Semangat perang suci ini kemudian menjadi kenangan yang membanggakan dan terus direproduksi baik pada perang Aceh dalam membela kemerdekaan Indonesia, perang DI/TII Aceh dan perang GAM.

Kata kunci: Islam, Politik Identitas, Perang Aceh.

## **A.Pendahuluan: Aceh dan Nilai-Nilai Islam**

Islam adalah pembentuk kesadaran identitas keacehan<sup>1</sup> utama. Proses Islamisasi yang sudah dimulai sejak zaman Kerajaan Islam Peureulak<sup>2</sup> (sekarang berada dalam wilayah Aceh bagian timur) pada abad ke 8, kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Islam Pase (sekarang berada dalam wilayah Aceh di bagian utara) sekitar abad ke 13 dan kemudian disusul oleh Kerajaan Islam Aceh Darussalam (yang kemudian menyatukan seluruh kerajaan yang ada di wilayah Aceh sebagai mana yang dikenal sekarang) pada akhir abad ke 15 dan permulaan abad ke 16.

---

1. Lihat Taufik Abdullah dalam Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta 1987, hal 12

2. Wilayah ini merupakan pusat pusat pendidikan Islam pertama di Nusantara dan kepulauan Melayu lainnya.

Proses ini telah menjadikan Aceh sebagai suatu wilayah Islam yang kemudian lebih dikenal sebagai negeri “Seuramoe Meukah” (Serambi Mekkah). Dalam konteks inilah kemudian Aceh menjadi melekat dengan Islam dan Islam melekat dengan Aceh. Islam kemudian menjadi suatu identitas yang melekat pada Aceh dan masyarakatnya. Karena proses islamisasi yang telah menyebar itulah menurut Dhakidae<sup>3</sup>, Islam telah menjadi identitas sosial bagi orang Aceh.

Hal itu terbentuk lewat perjalanan sejarah yang panjang yang menurut Dhofier<sup>4</sup> sebagaimana telah disebut di atas, Islam sudah mulai ada di wilayah Aceh sejak abad pertama Hijriah, yang kemudian terus diperkuat sejak zaman kerajaan Islam Peureulak disusul oleh zaman kerajaan Islam Pase dan zaman kerajaan Aceh Darussalam. Karenanya, orang Aceh sangat bangga bahwa melalui mereka dan daerah mereka lah agama Islam masuk ke Asia Tenggara. Kebanggaan itu bertambah lagi dengan melekatnya julukan Aceh sebagai “Seuramoe Meukah”. Julukan itu tidak saja karena kedalaman nilai Islam terhujam dalam kehidupan Aceh, namun karena ia juga merupakan sebuah kawasan di mana setiap orang dari Nusantara yang akan menunaikan ibadah haji ke Mekkah terlebih dahulu mampir di Aceh untuk memperdalam ilmu agama, begitu juga saat mereka kembali.

---

3. Lihat Daniel Dhakidae, *Aceh dan Papua, Dua Masalah Kompleks Dua Jenis Tawaran Penyelesaian. Kata Pengantar dalam Aceh, Papua, Jakarta: Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik. YAPPIKA. Jakarta 2001*, hal. 21-22

4. Lihat Daniel Dhakidae, *Aceh dan Papua, Dua Masalah Kompleks Dua Jenis Tawaran Penyelesaian. Kata Pengantar dalam Aceh, Papua, Jakarta: Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik. YAPPIKA. Jakarta 2001*, hal. 21-22

Bahkan menurut Melalatoa<sup>5</sup> transformasi nilai-nilai Islam melalui proses sosialisasi, enkulturasi dan pendidikan (formal dan non formal) itu sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan di Aceh. Sehingga lewat perjalanan dan pengalaman sejarah yang telah berjalan berabad-abad lamanya itulah nilai-nilai dan kaidah-kaidah Islam terinternalisasi (diresapi) ke dalam diri anggota masyarakat dan terobyektivasi (tercermin) dalam berbagai sistem berfikir dan aspek kehidupan, baik dalam perilaku, sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, seni, teknologi tradisional. Misalnya dalam hal sistem ekonomi. Di masa lalu seorang pedagang (muge) mengambil hasil pertanian dari petani produsen tanpa transaksi pembayaran terlebih dahulu. Pembayaran itu baru dilakukan dalam waktu yang relatif lama setelah dagangannya laku. Transaksi antara broker dan petani itu hanyalah berdasarkan kepercayaan<sup>6</sup>. Kepercayaan itu timbul karena mereka yakin, antara sesama muslim tidak akan ada yang berbohong atau menipu. Karena itulah Melalatoa secara umum berpandangan bahwa orang Aceh dikenal sebagai pemeluk agama Islam yang taat, bahkan terkesan fanatik.

Demikian juga dalam kehidupan sosial politik pengaruh tradisi Islam juga kental terlihat misalnya dalam mata uang emas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh tertera ungkapan al-sultan al-‘adil (raja yang adil). Konsep ‘adil yang tertulis dalam kepingan mata uang emas itu dipahami sebagai bentuk aktualisasi Firman Allah dalam Kitab Suci Al-Quran. Tradisi ungkapan al-sultan al-‘adil yang dipopulerkan oleh Kerajaan Samudra Pasai ini bahkan kemudian telah mempengaruhi mata uang Kerajaan-kerajaan Islam di Tanah Melayu seperti Melaka, Johor, Trengganu, Keudah, Brunai Darussalam.<sup>7</sup>

---

5. Ibid, hal. 25-28

6. Bandingkan fenomena ini dengan gagasan trust yang dikemukakan Fukuyama dalam membangun kejayaan ekonomi modern pada masyarakat Barat dan Jepang. Lihat Fukuyama, Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran. Qalam. Yogyakarta 2002

7. Lihat, Ibrahim Alfian, “Refleksi tentang Gempa-Tsunami: Kegemilangan dalam Sejarah Aceh. Dalam Aceh Kembali ke Masa Depan”. (Jakarta: IKJ Press, 2005), hal. 85



Apa yang menyebabkan sehingga raja-raja di Pasai yang kemudian diteruskan di Aceh dan raja-raja Melayu lainnya mencantumkan ungkapan al-sultan al'adil pada mata uang mereka? Sejarawan Ibrahim Alfian mengatakan bahwa raja-raja itu berupaya memerintah sesuai dengan kedudukan mereka sebagai raja muslim yang mengikuti perintah Allah. Hal ini sambung Alfian adalah sesuai sebagaimana tertera dalam Kitab Tajussalatin (Mahkota Segala Raja) karangan Bukhari al-Jauhari yang ditulis di Istana Aceh Darussalam pada 1603. Dalam kitabnya Jauhari mengutip Surat an-Nahl ayat 90 yang artinya "Bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kamu akan berbuat adil dan ihsan". Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Jawa dan menjadi pegangan bagi raja-raja Islam Mataram dengan judul Serat Tajussalatin.<sup>8</sup>

Dalam kitab Tazkiratur Rakidin Syekh Abbas ibnu Muhammad atau lebih dikenal dengan sebutan Teungku Syik Kutakareung menyebutkan:

"Adat ban adat hukum ban hukum, adat ngon hukum sama kembar; tatkala mufakat adat ngon hukum, nanggroe seunang hana goga" ("Adat menurut adat, hukum menurut hukum, adat dengan hukum (syara') sama kembar; tatkala mufakat adat dengan hukum, negeri senang tiada huru-hara").<sup>9</sup>

Yang dipahami sebagai adat dan hukum di sini adalah adat sebagai wilayah politik dan pemimpinnya adalah raja sebagai pimpinan politik. Sedangkan hukum adalah hukum syara' dan pemimpinnya adalah para alim ulama. Sehingga ungkapan "hana bak gop na bak geutanyoe, saboh nanggroe dua droe raja"<sup>10</sup> memiliki mafhumnya di sini.

---

8. Ibid, hal. 90-91

9. Lihat Alfian "Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah". Pusat Dokumentasi Aceh. Banda Aceh. 1999, hal. 210

10. Tiada di orang ada di kita, satu negeri dua raja.

Namun satu hal yang perlu diingat dari uraian di atas bahwa aspek syariat Islam sebagai pengejawantahan dari pesan suci Islam adalah nilai keadilan yang kelihatan lebih menonjol dalam sejarah perjalanan Islam di Aceh. Dimensi keadilan ini terutama penegakannya lebih dibebankan pada pemerintah sebagai pemimpin politik dalam penyelenggaraan negara sebagaimana terlihat dalam ungkapan al-sultan al-‘adil dalam mata uang mereka. Pemerintah di sini dipahami baru wajib diikuti manakala perintahnya itu bersatu dengan agama sebagaimana yang telah Allah perintahkan dalam ayat-ayatnya, Al-Quran Surat al-‘Araf ayat 3 menegaskan.<sup>11</sup>

Sedangkan ulama sebagai pemimpin agama lebih kepada kewajiban untuk menjaga agama, baik agama dalam pengertian ajarannya maupun agama dalam pengertian pengejawantahannya, sehingga para ulama yang disebut sebagai pemegang hukum batin atau nilai-nilai hukum Islam ini juga wajib diikuti perintahnya dan siapa yang tidak patuh akan mendapat bala (mala petaka). Dalam pengertian yang luas inilah Siegel<sup>12</sup> menyebut Orang Aceh sebagai bangsa yang tidak pernah dapat dilepaskan dari “Tali Tuhannya”.

Kembaran kepemimpinan politik dan agama ini masih dapat kita temui dalam unit teritorial terkecil di Aceh yakni gampong. Di mana di setiap gampong di Aceh selalu ada seorang keuchiek sebagai pemimpin politik (adat) dalam satu kampung dan teungku imum sebagai pemimpin agama.

---

11. Artinya “Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainNya (pemimpin-pemimpin yang membawa kepada ke sesatan). Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (dari padanya).

12. Lihat James T. Siegel, *The Rope of God*. University of Michigan Press. 2000.

Apa yang telah digambarkan di atas adalah nilai-nilai ideal yang bersifat normatif yang kemudian membentuk identitas Aceh yang dipahami sebagai Islam. Meskipun dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua dari dimensi ajaran normatif itu berjalan sebagaimana idealnya. Namun, jika nilai-nilai Islam ini dikaitkan dengan kehidupan sosial dan politik di Aceh, misalnya bagaimana membina sebuah keluarga, menjalin hubungan dengan kerabat dan tetangga, berdagang, membina kehidupan dalam satu teritorial (dari kampung sampai negara), ini memang dipahami sangat terkait dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian dapat dipahami juga bahwa Islam dalam konsepsi Orang Aceh tidak saja berurusan dengan perkara-perkara ibadah yang bersifat ritual-vertikal, baik dalam konteks hubungan individu dan sosial dengan Khaliq (Orang Islam mengenal perilaku ini dengan ibadah mahdhah), tetapi juga berurusan dengan ibadah yang bersifat horizontal dalam perkara-perkara sosial, ekonomi dan politik. Islam telah memberikan landasan nilai yang kuat yang melalui proses sosialisasinya kemudian melahirkan institusi-institusi sosial yang berfungsi tidak saja sebagai arena yang fungsional bagi penataan kehidupan sosial di dunai ini, tetapi juga sebagai arena ibadah yang oleh Orang Islam disebut dengan 'ammah. Islam memandang jika sesuatu apapun bila dikerjakan dengan landasan dan nilai-nilai Islam, maka itu adalah ibadah.

## **B.Perspektif dan Metode Pembahasan**

Perspektif dan metode pembahasan tulisan ini dielaborasi dalam bentuk diskusi deduktif – induktif sehingga kemungkinan pengulangan dari setiap uraian yang dibahas tidak dapat dihindari demi mengalirnya proses dialog ini.

Diskusi ini terutama didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan yang berbicara tentang empat perang yang pernah terjadi di Aceh yang di dalamnya telah berkelindan identitas keacehan yang paling azasi yaitu Islam. Data-data sosial dalam konteks kekinian yang telah diamati juga ditampilkan untuk menunjukkan gejala kontinuitas historis pembahasan.

Islam dan proses islamisasi dipahami tidak saja telah membentuk atau mensetting kesadaran identitas keacehan secara lebih luas tetapi juga dipandang sebagai aspek sosio-historis yang telah membentuk cara pandang diri, cara memahami diri dan cara mengenal diri sebagai Orang Aceh.

Pembahasan tentang empat perang Aceh yang didiskusikan ini pun dipandang didasarkan pada kesadaran identitas dan pandangan dunia sebagai Orang Aceh semacam ini. Wajah Islam sebagaimana akan ditunjukkan dalam pembahasan nanti tidak saja selalu menjadi roh yang selalu menyelubungi setiap periode perang Aceh tetapi sekaligus juga menjadi energi utama dan tujuan utama dalam setiap periode perang Aceh.

### **C. Perang Aceh Dengan Belanda**

Keutuhan sosial politik Aceh yang sudah dibentuk sejak 1520 akhirnya bertemu dengan Ultimatum Perang Kerajaan Belanda terhadap Kerajaan Aceh Darussalam pada 26 Maret 1873 yang disambut dengan perlawanan Aceh<sup>13</sup> dan perang yang baru bisa diatasi Belanda untuk sebagian wilayah Aceh tertentu pada tahun 1904<sup>14</sup>. Ultimatum Perang ini menunjukkan bukti bahwa sampai saat itu Kerajaan Belanda tetap mengakui kalau Kerajaan Aceh Darussalam itu adalah sebuah negara merdeka dan berdaulat penuh yang terpisah dari wilayah-wilayah jajahan lainnya yang telah ditaklukkan oleh Kerajaan Belanda sebelumnya.

---

13. Perlawanan ini bagi Aceh adalah sebagai sebuah perang sabil dalam rangka jihad fi sabi lillah.

14. Paul van't Veer bahkan menyebutkan bahwa perang Belanda dengan Aceh memakan waktu 70 tahun lamanya yang dimulai sejak 1873 sampai dengan 1942 di saat Belanda menyerah kepada Pentadbiran Militer Jepang. Lihat Alfian dkk., Perang Kolonial Belanda di Aceh. Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. Banda Aceh 1997, hal. 52

Pengakuan itu pun bukan tak berdasar mengingat hubungan diplomatik dua negara sebagaimana telah disebutkan di atas, telah terbina antara Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Oranje sejak Sultan Alauddin Riayat Syah al-Mukammil (1589-1604) mengirim seberkas surat kepada Prins Mauris (pendiri Dinasti Oranje) untuk memberi pengakuan kemerdekaan kepada Belanda dalam perang kemerdekaannya melawan Spanyol. Demikian juga dengan hubungan diplomatik dan perdagangan yang telah terjalin antara dua negara sejak yang telah dimulai sejak abad ke 16.<sup>15</sup>

Namun 300 tahun kemudian anak cucu Alauddin Riayat Syah ini dipencundangi oleh anak cucu pendiri Dinasti Oranje Prins Mauris. Dengan semangat kapitalisme beringas dalam wujud kolonialisme-imperialisme kemudian Belanda telah membuat ujung sejarah Aceh-Belanda berada dalam pusaran perang 70 tahun yang pada gilirannya telah menghancurkan leburkan Kerajaan Aceh dan Aceh dijadikan sebagai tanah jajahan Belanda. Sungguh suatu ironi peradaban. Bagi orang Melayu peristiwa semacam diibaratkan bagai “air susu dibalas air tuba”<sup>16</sup>.

Dalam sebuah buku sejarah yang dipenuhi oleh beragam gambar penjajah dan pejuang dituliskan:

---

15. Lihat Ibrahim Alfian, dkk, Perang Kolonial Belanda Di Aceh. Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. 1997, hal. 36. Lihat juga Surat Pangeran Maurits van Nassau kepada Sultan ‘Ala ad-Din (1600) dalam Denys Lombard, “Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)”. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). Jakarta 2007, hal. 313-lihat lampiran.

16. Perbuatan baik, dibalas dengan pengkhianatan.

Hari itu Rabu 26 Maret 1873, bertepatan dengan 26 hari bulan Muharram 1290 H. Dari geladak kapal komando Citadel van Antwerpwn – yang berlabuh di antara pulau Sabang dengan daratan Aceh – Kerajaan Belanda memaklumkan perang kepada Kerajaan Aceh .<sup>17</sup>

Sejak saat itu Kerajaan Aceh Darussalam dan rakyatnya berperang mati-matian melawan agresi Belanda. Padahal sebelumnya, Acehlah negara timur pertama yang mengakui kemerdekaan Belanda dari Spanyol<sup>18</sup> . Peperangan Aceh dengan Belanda itu kemudian telah membawa kehancuran bagi kedua belah pihak<sup>19</sup> . Kehancuran terutama sangat dirasakan oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Setelah Belanda dapat menduduki Dalam<sup>20</sup> pada tanggal 22 Januari 1874 kemudian Sultan dan pengikutnya mengungsi ke Lueng Bata di Banda Aceh dan akhirnya kemudian bermarkas di Keumala Pidie sampai kemudian ditawannya Sultan terakhir Kerajaan Aceh Darussalam Alaidin Muhammad Daud Syah pada 10 Januari tahun 1903<sup>21</sup>

---

17. Lihat Teuku Ibrahim Alfian dkk. Dalam “Perang Kolonial Belanda di Aceh”. Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. Banda Aceh. 1997, hal. 36

18. Lihat Teuku Ibrahim Alfian dalam “Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah”. Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. 1999, hal. 69-70

19. Paul van’t Veer mencatat sampai tahun 1914 saja 37.500 serdadu Belanda telah tewas di Aceh dan 70.000 di pihak Aceh. Sementara yang luka-luka tidak kurang dari 500.000 orang dari masing-masing pihak. Dia juga mencatat bahwa di antara tahun 1882-1893 sebanyak 51 orang militer Belanda berkebangsaan Eropa dan 28 pribumi menyeberang ke pihak Aceh. Demikian juga dengan sejumlah orang dari pihak Aceh yang menyeberang ke pihak Belanda dan menjadi pengkhianat bangsa. Lihat Teuku Ibrahim Alfian dkk. Dalam “Perang Kolonial Belanda di Aceh”. Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. Banda Aceh. 1997, hal. 54

20. Dalam bermakna istana raja atau pusat pemerintahan dan tempat kediaman Sultan

21. Lihat Teuku Ibrahim Alfian dkk. Dalam “Perang Kolonial Belanda di Aceh”. Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. Banda Aceh. 1997, hal. 52

Peristiwa ditawannya Sulthan oleh kolonial Belanda ada yang memaknainya bahwa perang Kolonial Belanda di Aceh telah selesai. Padahal meskipun telah ditawan Belanda, Sultan ternyata masih aktif berjuang untuk membela Aceh, hal ini terlihat misalnya secara rahasia Sultan masih berhubungan dengan pejuang Aceh dan setelah kediaman Sultan digeledah oleh Belanda, ditemukan berkas-berkas surat-menyurat Sultan dengan Kaisar Jepang yang meminta Jepang untuk membantu Aceh. Setelah kejadian itu, Sultan kemudian dibuang ke Ambon pada 24 Desember 1907<sup>22</sup>.

Namun demikian sebagaimana dicatat oleh Alfian ada juga yang membagi perang Kolonial Belanda di Aceh itu dalam tujuh tahap, yakni: (1) Agresi pertama pada 26 Maret 1873 di bawah Jenderal Kohler menemui gagal total. Bahkan kohler sendiri tewas diterjang peluru Tentara Aceh sehingga dengan penuh kecamuk duka pada pada 29 April 1873 Angkatan Perang Belanda meninggalkan Aceh kembali ke Jawa. (2) Agresi kedua tanggal 9 Desember 1873 di bawah Jenderal van Swieten dengan dilengkapi 67 kapal perang dan 7199 serdadu serta 250 kuli bebas, 243 perempuan, 1037 pelayan dan jawatan-jawatan kesehatan, meriam, berkuda, administrasi militer sudah mulai dapat menduduki tanah Aceh sampai dengan penghancuran dan pendudukan Dalam (istana) Sultan Aceh. (3) Masa konsolidasi 1874-1878. (4) Masa aksi kekerasan dan penaklukan Aceh Besar 1878-1879. (5) Masa pemerintahan sipil 1881-1884. (6) Masa kemunduran yang terus-menerus 1884-1896. (7) Masa kekerasan 1896 sampai dengan 1910<sup>23</sup>.

Namun catatan lain yang ditulis oleh Paul van't Veer seorang penulis berkebangsaan Belanda menyebutkan bahwa Perang Aceh berlangsung selama 70 tahun lamanya dan baru berakhir bulan Maret 1942 saat Belanda bertekuk lutut kepada Pentatbiran Militer Jepang.<sup>24</sup>

---

22. Ibid, 53

23. Ibid, hal. 52-54

24 Ibid, hal. 52 dan 56

Meskipun Kerajaan Aceh Darussalam telah diduduki oleh Belanda dan Sultan telah ditawan Belanda dengan cara yang sangat licik, yakni dengan menculik permaisuri Sultan, Pocut Cot Murong serta putra Sultan dan dijadikan sebagai tawanan untuk menekan Sultan yang kemudian membuat Sultan harus menyerah<sup>25</sup> karena membela istri dan anak adalah harga diri yang tak bisa ditawar bagi Orang Aceh tidak berarti perlawanan Aceh terhadap agresi Belanda berhenti. Bahkan perlawanan sesungguhnya terhadap Belanda dari semesta rakyat Aceh baru saja dimulai.

Menurut Taufik Abdullah<sup>26</sup> Perang Aceh dengan Belanda yang dimulai sejak 1873 sampai dengan datangnya Jepang pada tahun 1942<sup>27</sup> dapat dibagi dalam tiga fase penting, yakni: fase I, yang dikenal dengan sebutan perang antara dua negara (Kerajaan Aceh Darussalam dengan Belanda kolonial) di bawah pimpinan komando Sultan atau yang mewakilinya. Fase II, setelah Sultan mangkat dan dalam (istana) dikuasai Belanda, sedangkan Sultan yang menggantikannya masih di bawah umur, maka perang Aceh melawan Belanda itu lebih sebagai perang dari daerah-daerah di bawah komando para Ulebalang (bangsawan penguasa lokal). Di sini posisi Sultan hanya sebagai pemersatu bukan lagi komando. Fase III, setelah para Ulebalang berhasil ditaklukkan oleh Belanda baik ada yang syahid maupun ada yang bersedia menerima pengaturan kekuasaan baru dengan mengakui kekuasaan kolonial Belanda, maka perang yang lebih berdarah dan bersifat semesta yang meluas ke seluruh penjuru Aceh mulai berkecamuk di seluruh Aceh di bawah kepemimpinan para Teungku-teungku (ulama).

---

25. Ibid, hal. 52

26. Lihat Taufik Abdullah dalam Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta 1987, hal. 9-10

27. Lihat Paul van 't Veer, Perang Belanda di Aceh. Dinas P dan K DI. Aceh. Banda Aceh 1977. Lihat juga Ibrahim Alfian, dkk, Perang Kolonial Belanda Di Aceh. Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. 1997, hal. 52



Di bawah kepemimpinan para Teungku<sup>28</sup>, perang Aceh mengalami proses ideologisasi dan sakralisasi<sup>29</sup>. Perang tidak lagi hanya dimaknai sebagai membela negeri tetapi menjadi perilaku spiritual dan ibadah yang disucikan. Karenanya, kematian justru menjadi tujuan perang sebab di sanalah ia akan mejadi syuhada Allah untuk mendapat kehidupan bahagia yang hakiki. Berperang untuk membela kehormatan kemudian menjadi hal yang membanggakan bagi kesadaran Aceh dan bahkan kematian di medan perang sebagai syuhada menjadi hal yang diidam-idamkan. Semangat perang melawan kolonial Belanda ini kemudian menjadi kenangan yang membanggakan dan terus diceritakan secara turun-temurun.

Proses ideologisasi dan sakralisasi perang Aceh melawan Belanda ini sebagaimana dicatat oleh Ibrahim merupakan perwujudan dari aktualisasi Kitab Suci Al-Quran Surat al-Haj ayat 39<sup>30</sup> dan Surat al-Baqarah ayat 190<sup>31</sup> yang kemudian direproduksi kembali oleh para ulama dalam bentuk Hikayat Perang Sabi yang kemudian disosialisasikan kepada rakyat melalui khotbah-khotbah. Ideologi perang sabil ini sebenarnya telah muncul di Aceh sejak abad XVII.

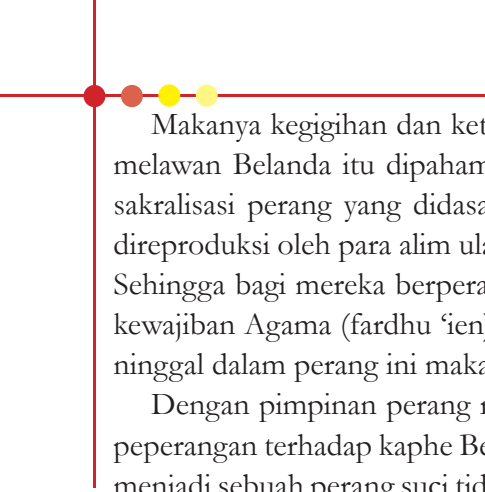
---

28. Istilah yang digunakan di Aceh untuk menunjuk tokoh agama Islam.

29. Hal ini sebagaimana tergambar dalam Hikayat Perang Sabi yang direproduksi oleh para Teungku Aceh. Misalnya Soe Prang Kaphe lam Prang Sabi, Niet peutinggi hak agama, Kalimah Allah agama Islam, Kaphe jahannam asoe nuraka, Sabilullah geupeunan prang, Tuhan pulang pageu syuruga, Ikot suroh sampoe janji, Pahala page that sampurna. Dalam Bahasa Indonesia; siapa yang memerangi kafir dalam perang sabil, dengan niat lillahita'la, kafir jahannam isi neraka, sabilullah dinamai perang, balasan Tuhan masuk syurga, laksanakan sampai mati, pahala akhirat paling sempurna. Periksa Ibrahim Alfian dalam, Perang di Jalan Allah. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta 1987, hal. 105-108

30. Artinya "Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi sebab mereka dianiaya".

31. Artinya " Dan perangilah pada jalan Allah terhadap orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah melanggar batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melanggar batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu dapati dan usirlah mereka di mana tempat kamu diusirnya".



Makanya kegigihan dan ketangguhan rakyat Aceh dalam berperang melawan Belanda itu dipahami didorong oleh semangat ideologi dan sakralisasi perang yang didasarkan pada keyakinan agama yang telah direproduksi oleh para alim ulama dalam bentuk hikayat prang sabi itu. Sehingga bagi mereka berperang melawan Belanda dipandang sebagai kewajiban Agama (fardhu 'ien) bagi setiap orang dewasa dan kalau meninggal dalam perang ini maka disebut sebagai mati syahid.

Dengan pimpinan perang rakyat berada ditangan para ulama maka peperangan terhadap kaphe Belanda yang dilancarkan oleh rakyat Aceh menjadi sebuah perang suci tidak saja untuk membela negara dari upaya koloniasasi Belanda, namun yang lebih hakiki perang itu adalah perang membela agama Islam. Perang itu oleh para ulama di Aceh pada waktu itu disebut sebagai jihad dan hukumnya wajib. Seorang ulama di Aceh Besar Syaikh Abbas ibnu Muhammad atau lebih populer dikenal dengan nama Teungku Chik Kuta Kareung yang hidup pada masa perang Belanda di Aceh sebagaimana dicatat oleh Alfian<sup>32</sup> menyatakan bahwa:

Tanah Aceh yang belum diduduki Belanda adalah Dar al-Islam, sedangkan daratan Aceh yang digenggam oleh kafir Belanda menjadi dar al-harb, dan dar al-harb harus ditaklukkan oleh orang Islam. Bila musuh telah menyerang negeri orang-orang Islam maka orang Islam wajib mempertahankan negerinya dari serangan musuh dan jadilah pekerjaan mengusir musuh itu fardhu 'ain, yaitu suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh tiap-tiap orang Islam yang akil baliq, termasuk wanita dan anak-anak, dan berdosa kepada Tuhan orang-orang Islam yang tiada menjalankannya.

---

32. Lihat Ibrahim Alfian dalam "Perang di Jalan Allah". Pustaka Sinar Harapan. Jakarta 1987, hal. 21

Rumusan tentang konsep dar al-Islam dan dar al-harb yang digagas di atas menunjukkan bahwa tanah Aceh tidak hanya dipahami sebagai tanah Orang Aceh atau tanah air bangsa Aceh, tetapi juga dipahami sebagai tanah Orang Islam (negara Orang Islam). Hal ini semakin memperjelas bahwa pandangan dunia Orang Aceh adalah tidak ada pemisahan antara Islam dan politik. Jadi ketika orang asing yang dirumuskan sebagai penjajah dan kafir datang ke tanah Aceh dan menduduki tanah Aceh, wilayah tersebut tersebut dikatakan sebagai wilayah perang, wilayah tempat Orang Aceh berjihad untuk merebut kembali tanah air mereka. Jadilah perang merebut tanah air ini bagi Orang Aceh sebagai perang suci membela Islam.

Doktrin tentang perang membela agama dan negara disebut dengan perang sabil atau jihad ini kemudian disebar luaskan kepada masyarakat lewat gubahan-gubahan ulama besar ke dalam bentuk hikayat prang sabil (hikayat perang sabil) yang terus dibacakan untuk menggelorakan perang melawan Belanda. Pembacaan Hikayat Perang Sabil dilakukan sebelum orang mara ke medan pertempuran. Tradisi orang membaca hikayat sebelum turun ke medan pertempuran sudah lama tertanam dalam kebudayaan Melayu. Dalam masa peperangan dengan Belanda, Orang Aceh membaca Hikayat Perang Sabil di dayah-dayah, di meunasah-meunasah dan di rumah-rumah atau di tempat-tempat lainnya sebelum orang pergi bertempur dengan Belanda. Di daerah-daerah yang sudah dikuasai Belanda orang membaca dan mendengar Hikayat Perang Sabil secara sembunyi-sembunyi khawatir ditangkap oleh pihak Belanda<sup>33</sup>. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perang sabil bagi Orang Aceh tidak saja telah menjadi pandangan dunianya dalam hal membela agama dan negara, tetapi juga tidak terpisahnya antara urusan agama dan politik.

---

33. Lihat Teuku Ibrahim Alfian dalam “Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah”. Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. 1999, hal. 174-175. Bandingkan dengan pelarangan beredarnya dan mendengarkan lagu-lagu Aceh yang berkaitan dengan heroisme keacehan dilarang secara tidak resmi oleh TNI pada zaman Aceh dalam Darurat Militer 2003-2004.

Tercatatlah nama–nama besar mujahidin Aceh seperti Teungku Chik Di Tiro beserta putra-putranya, Teuku Uma, Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Teungku Cot Plieng dan puluhan ribu mujahidin lainnya yang meridukan syahid. Salah satu gubahan Hikayat Prang Sabi yang sangat populer dan menggambarkan tentang rindu syahid adalah:

Nibak mate di rumoh inong, Bahle bak keunong seunjata  
kaphe, Nibak mate di ateueh tilam, Bahle lam seueh prang  
syahid mugule<sup>34</sup> .

Sakralisasi perang yang kemudian dengan cepat berubah bentuknya kepada rindu perang kemudian menemui bentuknya di sini di mana barang siapa yang ikut berperang sabil dan kemudian menemui kematiannya di medan perang itu maka kematian itu adalah mati syahid yang imbalannya sangat besar di sisi Allah kelak. Sekelumit hikayat prang sabi yang digubah oleh Teungku Chik Pante kulu di atas merupakan sarana yang telah digunakan dan disebar luaskan untuk memompa gelora perang rakyat Aceh dalam menghadapi serangan Belanda. Inilah pandangan dunia orang Aceh tentang perang bela negara yang tidak dipisahkan dengan perang membela Islam.

Gelora perang sabil sudah mulai diperkenalkan oleh ulama Aceh melalui hikayat perang sabil itu sejak perang Aceh-Portugis dimulai. Menurut Teungku Syaikh Ibrahim memang benar bahwa wawasan berperang sabil melawan kafir sudah ada sejak Portugis menyerang Kerajaan Aceh Darussalam. Bahkan secara teoretis tambah Alfian semangat perang sabil ini telah diyakini oleh rakyat Aceh sejak Islam bertapak di wilayah ini<sup>35</sup>.

---

34. Artinya dari pada mati di pangkuan isteri, lebih baik mati diujung senjata kafir, dari pada mati di atas kasur, lebih baik syahid dalam shaf perang. Lihat Teuku Ibrahim Alfian dkk. Dalam “Perang Kolonial Belanda di Aceh”. Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. Banda Aceh. 1997, hal. 144

35. Lihat Teuku Ibrahim Alfian dalam “Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah”. Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. 1999, hal. 172-173

Gubahan Hikayat Prang Sabi yang diinisiasikan oleh Al-Quran dan Hadis Nabi serta kitab-kitab agama Islam inilah yang telah menjadi faktor yang sangat penting dalam melahirkan semangat juang rakyat Aceh dalam melakukan perlawanan terhadap kafir Belanda. Afian<sup>36</sup> mencatat bahwa di samping faktor efektif tidaknya tekanan yang dilakukan Belanda dalam Perang Aceh, maka faktor ulama, sosio-kultural masyarakat Aceh dan penerimaan makna Hikayat Prang Sabi oleh rakyat yang Islami jelas merupakan faktor utama bergelornya Perang Aceh.

Belanda bahkan menganggap bahwa Hikayat Prang Sabi yang senyatanya memang dapat menjadi pendorong yang sangat besar bagi Orang Aceh dan sangat berbahaya bagi Belanda karena telah dapat mengobarkan semangat melawan Belanda (poh kaphe) untuk mencari syahid, sehingga Belanda berupaya mencari, menemukan, menyita dan memusnahkan Hikayat Perang Sabi itu dan para pembacanya<sup>37</sup>.

Sampai dengan Belanda mengangkat kakinya dari Aceh, perlawanan Rakyat Aceh dalam upaya mengusir Belanda dari tanah Aceh tidak pernah berakhir. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa tewasnya Kapten J. Paris serta anak buahnya pada tahun 1926 yang dilakukan oleh pasukan Aceh di bawah pimpinan Cut Ali di Aceh Selatan, peristiwa perlawanan rakyat Lhong tahun 1933, peristiwa Leupeung 1937, peristiwa Seulimum yang menewaskan Controleur Seulimum, J.C. Tiggelman dan Graaf U. Bernstorff von Sperling kepala urusan kereta api Aceh pada 23/24 Februari 1942<sup>38</sup>.

---

36. Lihat Ibrahim Alfian dalam "Perang di Jalan Allah". Pustaka Sinar Harapan. Jakarta 1987, hal. 230-231

37 Lihat Teuku Ibrahim Alfian dalam "Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah". Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. 1999, hal. 175

38 Lihat Teuku Ibrahim Alfian dkk. Dalam "Perang Kolonial Belanda di Aceh". Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. Banda Aceh. 1997, hal. 56


Kemudian dengan dibantu oleh bala tentara Jepang pada tahun 1942 Belanda berhasil terusir dari tanah Aceh. Setelah itu, kemudian Jepang pun berkehendak menjajah tanah Aceh sebagaimana pendahulunya Belanda, maka perang rakyat Aceh melawan Jepang dimulai sampai dengan Jepang menyerah kepada tentara sekutu setelah kalah dalam perang dunia II pada tahun 1945.

Mengingat akan apa yang telah disebutkan di atas, yang hendak dipahami secara kritis di sini adalah apakah penjajahan sebagian tanah Aceh yang telah dikuasai oleh Belanda pada masa perang Aceh-Belanda merupakan penjajahan Belanda yang terpisah dari Hindia Belanda lainnya sebagaimana juga diingatkan oleh Dhakidae,<sup>39</sup>. Kalau memang penjajahan itu bersifat terpisah, maka Aceh sejajar dengan jajahan Belanda lainnya seperti Afrika Selatan, Suriname dan tentu saja Hindia Belanda sendiri. Yang jelas perang Aceh dengan Belanda tidak ada kaitannya sama sekali dengan perang-perang yang terjadi di wilayah-wilayah lainnya di Nusantara pada waktu itu. Hal ini bermakna bahwa perang Belanda dan Aceh adalah perang antara dua negara yaitu negara Aceh dan negara Belanda. Bahkan anak negeri di wilayah-wilayah lainnya di Nusantara yang telah ditundukkan oleh Belanda malah ikut dalam rombongan tentara kolonial Belanda dalam masa perang Aceh dengan Belanda.<sup>40</sup>

---

39. Lihat, Daniel Dhakidae, Aceh dan Papua, Dua Masalah Kompleks Dua Jenis Tawaran Penyelesaian. Kata Pengantar dalam Aceh, Papua, Jakarta: Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik. YAPPIKA. Jakarta 2001, hal. 23-24

40. Dalam satu foto yang diambil dari Gerbang Kehormatan di Surabaya setelah ekspedisi ke dua tentara Kolonial Belanda dianggap berhasil dalam perang pada tahun 1874. Di Gerbang Kehormatan itu ditulis "Hormat Warga Surabaya kepada Angkatan Darat dan Angkatan Laut". Lihat Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1987, hal. 180-lihat lampiran. Dalam rombongan Tentara Kolonial Belanda pada agresi Belanda pertama ke Aceh pada tahun 1873 telah diikutsertakan sejumlah tentara dari Bangsa-Bangsa Pribumi; 28 orang perwira Pribumi dari 168 perwira, 2100 orang bawahan Pribumi dari 3198 bawahan, 220 orang perempuan Pribumi, 300 orang pelayan Pribumi. Lihat Ibrahim Alfian, dkk, Perang Kolonial Belanda Di Aceh. Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. 1997, hal. 38



Satu hal yang perlu dicatat di sini adalah bahwa perang Aceh dengan Belanda adalah perang dua negara berdaulat sebagaimana disebutkan di atas, namun dalam pasukan tentara Belanda itu ternyata kebanyakan dari prajuritnya itu berasal dari orang Jawa, Batak, Ambon. Hal ini sebagaimana juga dapat dilihat dari nama-nama yang dicatat di batu nisan mereka di Kerkof, kompleks kuburan para prajurit Belanda yang meninggal dalam peperangan di Aceh di Banda Aceh. Hal ini wajar terjadi manakala kita memahami bahwa negara-negara Jawa, Batak, dan Ambon adalah negeri-negeri yang telah lama dijajah oleh Belanda sehingga masyarakatnya pun dalam batasan tertentu kemudian juga telah menerima dan menjadi pegawai dari kekuasaan Hindia Belanda.

Namun bila melihat fakta-fakta sejarahnya, dalam memperluas tanah jajahannya terutama di kawasan Nusantara. Untuk kasus Aceh misalnya ketika Belanda hendak menaklukkan Aceh, Belanda terlebih dahulu mengirim perutusannya untuk memaksa kehendak mereka secara damai. Karena hal itu tidak berhasil maka kemudian sebuah permakluman perang secara resmi kepada Kerajaan Aceh Darusslam dilayangkan. Dua hal ini juga menunjukkan bahwa sampai saat itu pun Belanda tetap menempatkan Aceh sebagai tanah yang bertuan dan sebuah negara yang berdaulat.

Di sisi lain, periode perang Aceh dengan Belanda ini sebagaimana telah digambarkan di atas, tidak saja dipahami sebagai perang membela tanah air Orang Aceh, tetapi juga perang membela Islam itu sendiri. Di sisi lain, apa yang disampaikan di atas juga menunjukkan pandangan dunai Orang Aceh yang tidak mengenal pemisahan antara masalah keislaman dan kepolitikan. Hal ini disebabkan sistem dan dinamikan kepolitikan Aceh itu sendiri dirumuskan dan diorientasikan di atas sistem Islam untuk kemajuan Ummat Islam Aceh itu diri.

Kegigihan dan ketanggahan rakyat Aceh dan tokoh-tokohnya dalam berperang melawan Belanda merupakan suatu fakta sejarah yang juga dapat menjadi 'i'tibar bagi generasi berikutnya. Peristiwa-peristiwa heroik Orang Aceh dalam perang Aceh melawan Belanda ini selalu ditempatkan dalam konteks bela negara bela agama. Maka dalam pandangan orang Aceh berperang dengan Belanda pada waktu itu adalah

jihad, sehingga perang itu sendiri menjadi sesuatu yang dirindukan karena itu adalah jalan cepat menuju syurga dengan segala bidadarinya. Jadi perang Aceh itu tidak saja dapat dipahami dalam dimensi politik dan kekerasan, tetapi terutama harus dapat dipahami dalam dimensi Islami dalam termonologi jihad fisabilillah atau perang suci. Mengapa demikian? Sebagaimana telah dijelaskan di muka, hal ini harus dipahami karena bagi Orang Aceh tidak ada pemisahan antara dimensi sosial dan Islam. Keduanya adalah Islami.

Atas semua peristiwa heroik Orang Aceh dalam perang antara Aceh dan Belanda ini sampai-sampai mengundang seorang penulis berkebangsaan Belanda Zentgraaf<sup>41</sup> untuk mengajukan pertanyaannya:... dan adakah suatu bangsa di muka bumi ini yang tak akan menulis tentang gugurnya para tokoh heroik mereka dengan rasa penghargaan yang sedemikian agung di dalam buku sejarahnya?...”

Catatan sejarah tentang heroisme Orang Aceh ini tidak saja diceritakan, dinyanyikan, dibanggakan, tetapi bahkan dirindukan oleh Orang Aceh. Internalisasi nilai-nilai Islam yang telah digubah ke dalam bentuk nyanyian yang ditanam sejak dari ayunan oleh sang bunda sampai ke tarian-tarian perang dan heroisme Aceh inilah biang keladi dari semua ini. Bahkan kolonial Belanda pada zaman ia berperang dengan Aceh melarang penggugah heroisme ini dibacakan sehingga mereka mencari, menemukan, menyimpan dan bila perlu memusnahkan hikayat perang sabil Aceh. Nyanyian-nyanyian penggugah semangat patriotisme Orang Aceh ini juga kembali menemui nasib yang sama ketika TNI secara tidak resmi telah merazia dan melarang supaya nyanyian-nyanyian semacam yang terekam dalam album “Nyawong” atau “nyawa” didengarkan di Aceh di zaman perang RI dan GAM.<sup>42</sup>

---

41. Lihat H.C.Zentgraaf, “Aceh” sebagaimana dikutip juga oleh Ibrahim Alfian, dkk dalam Perang Kolonial Belanda Di Aceh. Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. 1997, hal. 56

42. Informasi ini penulis peroleh dari Muslem di Lhokseumawe pada 23 Mei 2006.



Semua catatan sejarah ini telah membentuk kesadaran Orang Aceh bahwa mereka adalah sebuah bangsa yang tidak akan bersedia dijajah dan diperintah oleh bangsa lain. Sehingga bagi Dhakidae<sup>43</sup> peristiwa perang Aceh dengan Belanda ini pun diyakini telah membentuk suatu identitas tersendiri bagi Aceh. Identitas sebagai bangsa yang mau diatur apalagi dirumuskan sebagai dijajah oleh bangsa lain baik dalam dimensi kultural maupun struktural.

#### **D. Zaman Revolusi Fisik Kemerdekaan Indonesia**

Tidak lama setelah Republik Indonesia diproklamkan pada 17 Agustus 1945, maka bersamaan dengan memuncaknya agresi Belanda ke II datanglah Soekarno ke Aceh dan bertemu Teungku M. Daud Beureueh. Setelah berdiskusi panjang lebar dan menebar janji-janji, Soekarno yang mengerti betul bagaimana kaitannya antara Orang Aceh dengan Islam pun mendapat jaminan dari Beureueh bahwa Aceh akan membantu Indonesia demi Islam<sup>44</sup>. Maka, tak lama kemudian tepatnya pada 15 Oktober 1945 keluarlah Maklumat Ulama Seluruh Aceh yang menyatakan bahwa:

Indonesia adalah tanah tumpah darah kita, Belanda sedang berupaya menjajah kembali Indonesia dan ini akan berakibat pada penghancuran Indonesia sebagai negara, rakyat akan diperbudak kembali, agama Islam yang suci akan dihancurkan serta akan menindas dan menghambat kemuliaan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Menurut keyakinan kami bahwa perjuangan ini adalah perjuangan suci yang disebut "Perang Sabil" dan percayalah wahai bangsaku bahwa perjuangan ini sebagai sambungan perjuangan dahulu di Aceh yang dipimpin oleh Almarhum Teungku Thik di Tiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan yang lain. Dari sebab itu bangunlah wahai bangsaku sekalian, bersatu padu me-

43. Lihat Daniel Dhakidae, Aceh dan Papua, Dua Masalah Kompleks Dua Jenis Tawaran Penyelesaian. Kata Pengantar dalam Aceh, Papua, Jakarta: Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik. YAPPIKA. Jakarta 2001, hal. 23-24

44. Lihat Percakan dan janji-janji Sukarno kepada Teungku M. Daud Beyreueh dalam pengakuan Beureueh "Mengapa Saya Angkat senjata"? dalam M. Nur el Ibrahimy "Peranan Teungku M. Daud Beureueh dalam Pergolakan Di Aceh". Media Dakwah. Jakarta. 2001, hal. 77-79

nyusun bahu, mengangkat langkah maju ke muka untuk mengikut jejak perjuangan nenek kita hahulu. Tunduklah dengan patuh akan segala perintah-perintah pimpinan kita untuk keselamatan Tanah Air, Agama dan Bangsa<sup>45</sup>.

Maklumat ini ditanda-tangani oleh 4 orang ulama Aceh yaitu Teungku Hasan Krueng Kale, Teungku Haji Ja'far Sidik, Teungku Ahmad Hasballah Inderapuri dan Teungku M. Daud Beureueh<sup>46</sup> dan dua pejabat pemerintah yakni T. Nyak Arif sebagai Residen Aceh dan Tuanku Mahmud sebagai Ketua komite nasional. Salah seorang di antara mereka dan bertindak sebagai ketua yakni Teungku. M. Daud Beureueh, dikemudian hari melakukan pemberontakan terhadap Pemerintah Republik Indonesia dan beliau bertindak sebagai pimpinannya dalam Gerakan DI/TII Aceh pada tahun 1953 karena merasa Soekarno telah mengkhianati janjinya bahwa negara Indonesia merdeka adalah negera Islam.

Dalam seruan ulama di atas, terlihat bahwa semangat kebersamaan dalam keindonesiaan begitu kuat karena didasarkan pada pemahaman mereka bahwa berjuang untuk Indonesia merdeka adalah berjuang demi kejayaan Islam. Hal ini, sebagaimana terlihat dalam maklumat itu disebabkan oleh beberapa alasan.

Pertama, karena semangat mengusir penjajah Belanda yang mencoba kembali ke bekas tanah jajahannya. Kedua, kalau sampai Belanda menjajah kembali Indonesia ini akan berakibat pada penghancuran Indonesia sebagai negara. Ketiga, rakyat akan diperbudak kembali. Keempat, agama Islam yang suci akan dihancurkan. Kelima, kemuliaan dan kemakmuran bangsa Indonesia akan dihambat. Keenam, keyakinan kami bahwa perjuangan ini adalah perjuangan suci yang disebut Perang Sabil. Ketujuh, perjuangan ini adalah perjuangannya sambungan Aceh dahulu yang telah dipimpin oleh Almarhum Teungku Chik di Tiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan yang lain. Kedelapan, perjuangan ini adalah untuk keselamatan Tanah Air, Agama dan Bangsa.

45. Selengkapnya lihat Salinan Naskah, Maklumat Ulama Seluruh Adgeh. Kutaradja 15-10-1945.

46. Keempat orang itu adalah berasal dari kelompok ulama PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh)

Harapan semacam itu dapat muncul dari Orang Aceh kepada Indonesia karena mereka sebagaimana dikatakan oleh sejarawan Anthony Reid mereka mengira bahwa ada kesamaan tujuan historis antara Aceh dan Nasionalisme Indonesia<sup>47</sup>. Hal ini tentu tidak lepas dari janji Presiden Soekarno yang diberikan kepada Orang Aceh bahwa nasionalisme Indonesia itu adalah demi Islam. Sementara basis dan tujuan historis Aceh itu pun Islam. Pada masa itu dipahami bahwa identitas keacehan yang Islam akan ditemukan dalam keindonesiaan yang dijanjikan oleh Sukarno sebagai Islam pula.

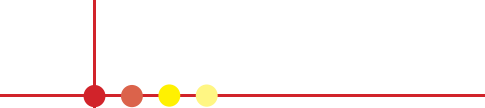
Setelah maklumat ulama itu dipermaklumkan maka sebagaimana telah disebutkan di muka Aceh memberikan segala-galanya untuk tegaknya Republik Indonesia. Tercatatlah sumbangan Orang Aceh kepada Negeri baru ini mulai dari menyumbangkan dua buah pesawat terbang kepada pemerintah Jakarta<sup>48</sup>, membeli obligasi pemerintah, mengumandang keberadaan negara Indonesia melalui radio Rimba Rayanya kepada dunia internasional<sup>49</sup>, membiayai keuangan bagi Pemerintah Jakarta tidak kurang dari US\$ 250.000,-.

---

47. Lihat Anthony Reid, *Perlawanan Dalam Sejarah Nanggroe Aceh Darussalam*. Tempo Edisi 18-24 Agustus 2003.

48. Dua buah pesawat tersebut dibeli oleh rakyat Aceh untuk kepentingan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang digunakan oleh pemerintah pusat. Kedua buah pesawat yang bernama Seulawah I dan Seulawah II dikemudian hari berubah nama menjadi pesawat Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan milik pemerintah RI.

49. Lihat Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1997, hal. 186



Tak hanya harta bendanya saja disumbangkan untuk Republik baru ini tapi nyawanya sekalipun telah diberikannya dalam peperangan di Sumatera Utara yang dikenal dengan peristiwa Medan Area untuk menghadang agar Belanda tak menginjakkan kakinya kembali ke Aceh. Dengan demikian, setapak tanah Republik dapat dipertahankan sehingga dunia menyepakati bahwa Indonesia itu masih ada. Nayawa dan harta yang diberikan oleh orang Aceh itu sebagaimana dikatan oleh Abdullah adalah lillahi ta'ala karena mereka membayangkan perjuangan penegakan Indonesia itu sebagai perjuangan penegakan kalimatullah.

Tetapi kita jangan lupa bahwa semua pengorbanan Orang Aceh ini dilakukannya semata-mata karena mengharap ridha Allah. Sejarawan Taufik Abdullah melukiskan peristiwa ini sebagai berikut:

...periode revolusi kemerdekaan nasional dirasakan sebagai bukti dari keterlibatan Aceh dalam "masyarakat bangsa" yang telah mengatasi ke-Aceh-an, dan lebih penting lagi, bagaimana dengan ke-Aceh-an cita-cita nasional dapat dibina. Adalah suatu kebanggaan untuk mengingat bahwa kenyataan betapa Aceh merupakan satu-satunya wilayah ditanah air kita yang terbebas dari injakan tentara Belanda, dan bagaimana Aceh demi kesadaran nasional dan lillahi ta'ala memberikan apa saja yang diperlukan bagi perjuangan nasional merebut kemerdekaan<sup>50</sup>.

---

50. Lihat Taufik Abdullah dalam Ibrahim Alfian dalam "Perang di Jalan Allah". Pustaka Sinar Harapan. Jakarta 1987, hal. 12

Begitu besarnya harapan akan Indonesia Merdeka sebagaimana yang mereka bayangkan dalam maklumat ulama itu sehingga mereka tidak ragu-ragu lagi untuk berjuang bersama-sama untuk menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun apa dinyana, harapan hanya tinggal kenangan pahit manakala segalanya telah selesai. Ternyata Indonesia merdeka dikemudian hari tidak sebagaimana harapan Orang Aceh yaitu untuk Islam, Tanah Air dan Bangsa. Seperti yang tercantum dalam Maklumat Ulama Ulama Seluruh Aceh.<sup>51</sup> Harapan ini meminjam Reid, merupakan harapan historis yang membentuk identitas keacehan yang disangka akan ditemui dalam alam kemerdekaan Indonesia.

Satu hal menarik yang perlu diungkap kembali di sini adalah bahwa semangat Aceh yang begitu nyata dalam membantu menyelamatkan tegaknya Republik ini ternyata karena mereka telah mendapat satu jaminan lisan dari Presiden pertama RI, Soekarno bahwa di samping Aceh akan dijadikan wilayah berhukum Islam yang otonom di tingkat nasional pun dengan merujuk pada Piagam Jakarta, Presiden menjamin pelaksanaan syariat Islam bagi semua ummat Islam di Indonesia. Tidak hanya itu, setelah didesak lagi oleh para ulama di Aceh Soekarno pun menegaskan bahwa Indonesia akan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Tetapi apa yang terjadi? Sejarawan Taufik Abdullah<sup>52</sup> menyebutkan, mestikah diherankan kalau kejujuran Bung Karno disangsikan?

Namun kalau Orang Aceh memahami bagaimana peristiwa yang terjadi disepulur menjelang Proklamasi Kemerdekaan RI dan satu hari setelah RI merdeka masalahnya menjadi lain. Piagam Jakarta yang lahir pada 22 Juni 1945 yang merupakan kompromi antara pihak Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Islam dalam perdebatan BPUPKI. BPUKI pada waktu itu memang telah menyepakati bahwa yang menjadi landasan filosofis negara Indonesia merdeka adalah Piagam Jakarta. Jadi

---

51. Lihat Isi pokok Malumat Ulama Seluruh Atjeh. Kutaraja 15-10-1945. Lihat juga lampiran Percakan dan janji-janji Sukarno kepada Teungku M. Daud Beyreueh dalam pengakuan Beureueh "Mengapa Saya Angkat senjata?" dalam M. Nur el Ibrahimy "Peranan Teungku M. Daud Beureueh dalam Pergolakan Di Aceh". Media Dakwah. Jakarta. 2001, hal. i-iii

52. Lihat Taufik Abdullah, Pejuang Kemerdekaan yang Berontak. Tempo Edisi 18-24 Agustus 2003.

Indonesia merdeka memang diproklamirkan atas dasar Piagam Jakarta. Tetapi pada tanggal 18 Agustus 1945 Piagam Jakarta sebagai landasan filosofi Negara Indonesia yang telah merdeka itu diganti dengan Pancasila. Dengan argumen untuk menyelamatkan keutuhan negara. Karena kalau masih didasarkan pada Piagam Jakarta, wilayah bagian timur Indonesia akan melepaskan diri dengan Indonesia. Maka atas inisiatif Bung Hatta yang didukung Bung Karno, PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar RI.<sup>53</sup>

Namun yang mengherankan mengapa Bung Karno sebagai Presiden RI ketika berkunjung ke Aceh tetap menggunakan Islam sebagai jalan masuk meminta dukungan rakyat Aceh untuk sama-sama berjuang dalam menegakkan Indonesia merdeka. Padahal sudah jelas bahwa Indonesia ini adalah negara nasional, bukan negara Islam. Barangkali inilah yang dikatakan oleh sejarawan Taufik Abdullah dengan ungkapan di atas, bukanlah suatu hal yang mengherankan kalau kejujuran Bung Karno disangsikan.

Sebagaimana pengetahuan umum, Soekarno juga memahami bahwa bagi Orang Aceh mendengar bahwa suatu perjuangan itu adalah untuk Islam, maka mereka akan menyokongnya. Sokongan yang diberikan pun tidak hanya harta benda, tetapi yang lebih utama lagi adalah nyawanya sekalian karena mereka berfikir kalau berperang demi Islam maka matinya itu adalah syahid. Inilah kesadaran identitas Orang Aceh. Di sini jelas Soekarno memahami betul politik identitas Orang Aceh. Ia pun memanfaatkannya. Jadi karena Islamlah Aceh melibatkan dirinya dengan Indonesia.

Tidak lama setelah Belanda terusir dari tanah tumpah darah kita yakni Nusantara atau Hindia Belanda, maka Beureueh pun sepakat dengan ujaran dalam nada keseharian orang-orang Aceh untuk menumpahkan kekesalannya kepada sistem kepolitikan Indonesia yakni ”meunyoe urojeh dijajah teuh lee kafe kulet puteh, uronya ka dijajah teuh leu kafe meuija kroeng<sup>54</sup> ”. Maka Beureueh pun kembali mengangkat senjata

53. Lihat Dhuroruddin Mashad dalam “Akar Konflik Politik Islam Indonesia”. Pustaka Al-Kausar. Jakarta 2008, hal. 58

54. Artinya kalau dulu kita dijajah oleh kafir kulit putih, sekarang kita telah dijajah oleh kafir berkayin sarung.

dan berperang (dalam rumusan perang sabil) melawan Pemerintah RI pada tahun 1953. Dan darah pun kembali tumpah di tanah kita.

Dalam pada itu, di Aceh sendiri pada tahun 1946 telah terjadi konflik internal antara Ulama Pusa dan para Uleubalang (bangsawan) yang pada zaman Belanda mereka telah mengakui kedaulatan Belanda. Perang internal itu dikenal dengan perang cumbok<sup>55</sup> yang dimenangkan oleh para Ulama Pusa di bawah pimpinan Tgk. M. Daud Beureueh. Perang itu sendiri didasarkan pada isu bahwa para uleubalang akan menggalang kekuatan kembali dan tengah mempersiapkan kembalinya kedatangan Belanda ke Aceh dengan asumsi bahwa pada saatnya Aceh akan dikembalikan kepada Orang Aceh (uleubalang) sebagai sebuah negara merdeka.

Dengan demikian maka para Uleubalang ini sebetulnya tidak setuju dengan penggabungan Aceh ke RI. Mereka tetap berpandangan Aceh harus berdiri sendiri sebagai sebuah negara merdeka. Namun sebelum sampai ke sana, Aceh harus siap menerima kembalinya Belanda ke tanah Aceh dan pada saatnya Belanda akan mengembalikan kemerdekaan Aceh sebagai sebuah negara berdaulat.

Tetapi kaum ulama (Pusa) yang nota bene sudah merupakan orang republiken (pro Indonesia) tetap berpandangan bahwa Belanda itu adalah kafir dan penjajah. Sehingga mereka pun tidak ingin kehilangan momentum untuk sepenuhnya mengindonesiakan Aceh sebagaimana yang mereka bayangkan sebagai Islami, maka pecahlah perang Combok. Atas dasar rumusan Orang Aceh yang tidak memisahkan antara Islam dan politiklah, Aceh menceburkan dirinya ke dalam kepolitikan Indonesia yang dibayangkan pada waktu itu sebagai Islami.

---

55. Disebut Perang Cumbok karena sebenarnya hanya Uleubalang Cumbok yakni Muhammad Daud Cumbok yang hendak diperangi karena dia diterpa isu hendak menjemput kembali Belanda ke Aceh. Namun kemudian yang diperangi bukan hanya Uleebalang Cumbok tetapi juga meluas kepada Uleebalang yang lain. Cumbok sendiri adalah nama sebuah daerah di Pidie. Lebih jauh mengenai peristiwa ini baca Nazaruddin Syamsuddin, *Revolusi di Serambi Mekah*, UI Press. Jakarta. 1999.

## E. Gerakan DI/TII Aceh dan RIA

Dalam satu tulisan yang berjudul "Mengapa Saya Angkat Senjata", Teungku M. Daud Beureueh yang sebelumnya dikenal sebagai pentolan Republiken di Aceh menjelaskan alasan dia mengangkat senjata melawan Pemerintah Republik Indonesia antara lain dapat disimpulkan:

"...Ketika saya tanya Soekarno: "Untuk apa Indonesia merdeka"? Soekarno menjawab: "Untuk Islam Kak". Saya tanya lagi, "betulkah ini"? Jawabnya, "betul Kak". Saya tanya sekali lagi, "betulkah ini"? Dia jawab, betul Kak. Saya ulangi lagi, "betulkah ini"? Pada waktu itulah Soekarno berikrar. "Kakak! Saya adalah seorang Islam. Sebagai seorang Islam saya berjanji dan berikrar bahwa saya sebagai seorang Presiden akan menjadikan Republik Indonesia yang merdeka sebagai Negara Islam di mana hukum dan pemerintahan Islam terlaksana..."


"...Tapi apa yang berlaku setelah revolusi kemerdekaan mencapai kemenangan? Sesudah Belanda terusir dari bumi Indonesia ini? Jangankan Soekarno memenuhi janji dan ikrarnya, tapi Soekarno telah mengkhianati cita-cita revolusi itu. Soekarno hanya menghidupkan segala macam maksiat dan kemungkaran. Soekarno menentang Islam, memisahkan Islam dari negara dan pemerintahan, malah Islam itu akan terpisah dari masyarakat kita".

"Pancasila yang selalu diagung-agungkan itu, dengan tafsiran dan pelaksanaannya, ternyata bukanlah wadah untuk Islam. Ternyata bahwa Pancasila dengan tafsiran dan pelaksanaannya adalah syirik yang sesat dan menyesatkan, yang hanya sesuai dengan agama Hindu dan agama-agama lain di luar Islam<sup>56</sup> ..."

---

56. Selengkapnya lihat lampiran Percakan dan janji-janji Sukarno kepada Teungku M. Daud Beyreueh dalam pengakuan Beureueh "Mengapa Saya Angkat senjata"? dalam M. Nur el Ibrahimy "Peranan Teungku M. Daud Beureueh dalam Pergolakan Di Aceh". Media Dakwah. Jakarta. 2001.



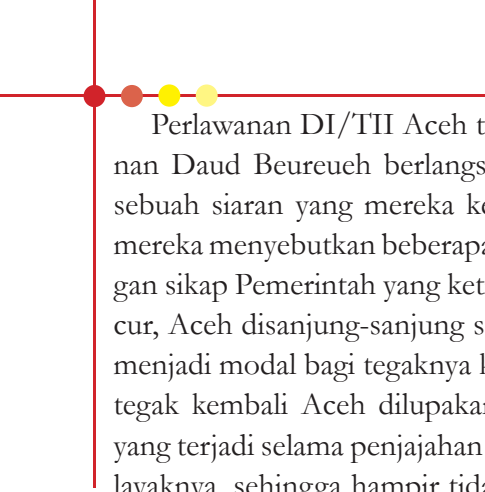


Revolusi kemerdekaan Indonesia bagi Beureueh adalah revolusi menegakkan Islam di Indonesia, bukan untuk tujuan yang lain. Sekiranya bukan untuk tujuan Islam, maka penceburan diri Aceh dalam revolusi itu barangkali tidak pernah ada. Begitulah gambaran yang dapat dibaca dari dialog Soekarno dan Beureueh di atas. Demikian juga, ketika Islam ternyata tidak ditemui Beureueh dalam alam kemerdekaan Indonesia, ia pun sangat berang. Ia pun menyebut bahwa Soekarno telah mengkhianati revolusi itu sendiri. Revolusi yang dimaksud tentu revolusi yang bagi Beureueh telah didasarkan dan untuk tujuan Islam.

Setelah melihat kenyataan dan pernyataan-pernyataan Sukarno berikutnya yang menunjukkan bahwa Sukarno tidak akan menjadikan Indonesia merdeka sebagai negara Islam<sup>57</sup> dan ditambah lagi dengan kedudukan Aceh yang pada awal kemerdekaan RI sebagai sebuah Provinsi kemudian digabungkan ke Sumatera Utara dan Aceh hanya menjadi sebuah Residen kemudian ditambah lagi dengan kenyataan bahwa banyak pejabat-pejabat non muslim dikirim ke Aceh. Maka tepat pada 21 September 1953 meletuslah Gerakan DI/TII Aceh pada 21 September 1953 di bawah pimpinan Tgk. M. Daud Beureueh yang merupakan pentolan ulama dan ketua PUSA dan salah seorang aktor pembawa Aceh masuk ke Indonesia.

---

57. Misalnya Pidato Presiden Sukarno di Amuntai yang menyatakan tidak menyukai lahirnya Negara Islam dari Republik Indonesia. Lihat Bung Karno: Negara Nasional dan Cita-Cita Islam. Disunting oleh Swiditono. PT. Visi Gagas Komunka. Depok. 2007, hal. 18-19



Perlawanan DI/TII Aceh terhadap Pemerintah RI di bawah pimpinan Daud Beureueh berlangsung selama 9 (sembilan) tahun. Dalam sebuah siaran yang mereka keluarkan pasca deklarasi perjuangannya, mereka menyebutkan beberapa hal, di antaranya: Rakyat tidak puas dengan sikap Pemerintah yang ketika dalam keadaan Republik hampir hancur, Aceh disanjung-sanjung sebagai daerah modal dan memang Aceh menjadi modal bagi tegaknya kembali RI. Akan tetapi setelah Republik tegak kembali Aceh dilupakan serta dibiarkan terlantar. Kehancuran yang terjadi selama penjajahan tidak dijamah dengan perbaikan yang selayaknya, sehingga hampir tidak ada kesempatan bagi anak-anak Aceh untuk belajar dan rakyat umumnya tidak memiliki penghidupan yang layak. Rakyat kecewa dengan sikap Pemerintah yang tidak memenuhi tuntutan rakyat untuk menjadikan Aceh sebagai daerah otonom, sehingga rakyat Aceh dapat mengurus dirinya sendiri. Jadi pada masa ini mereka menginginkan biarkan Aceh mengurus dirinya sendiri secara otonom dalam RI.

Rakyat Aceh sangat kecewa melihat sikap Soekarno dan beberapa pemimpin lain yang sengaja menyempitkan jalan bagi jihad umat Islam untuk memperjuangkan terlaksananya ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara, bahkan lebih dari itu mereka berusaha membelokkan dasar dan falsafah negara Republik Indonesia ke arah yang sesat. Atas dasar inilah dalam gerakan DI/TII itu berlaku semboyan Yuqta au Yaghlib (mati syahid atau menang)<sup>58</sup>. Jadi Gerakan DI/TII Aceh ini dapat dibaca sebagai kelanjutan revolusi kemerdekaan Indonesia dengan dasar dan tujuan penegakan negara Islam Indonesia yang dipahami sebagai atas dasar inilah Aceh menceburkan dirinya ke Indonesia. Di sisi lain kewenangan Aceh untuk mengurus dirinya sendiri dan membangun dirinya yang telah porak-poranda akibat perang yang berkepanjangan pun telah dikebiri oleh Pemerintah RI. Kewenangan Aceh untuk mengurus diri sendiri yang dimaksud tentu tidak dapat dilepaskan dari spirit Islam.

---

58. Lihat Hasan Saleh "Revolusi Islam di Indonesia" dalam M. Nur el Ibrahimy "Peranan Teungku M. Daud Beureueh dalam Pergolakan Di Aceh". Media Dakwah. Jakarta. 2001, hal. 3

Hal-hal inilah yang membuat para pemimpin Aceh pada saat itu marah kepada Pemerintah Republik Indonesia dan kemudian memproklamkan diri dan bergabung Darul Islam / Tentara Islam Indonesia pimpinan Imam Kartosuwiryo yang sudah lebih dahulu diproklamkan pada 7 Agustus 1949. Yang ingin dicapai oleh para pemimpin Aceh dengan pemberontakan itu adalah tegaknya Negara Islam Indonesia dan Aceh memiliki hak otonomi penuh untuk mengurus dirinya sendiri.

Patut dicatat di sini bahwa pada tanggal 1 September 1954 dari New York Hasan Muhammad Di Tiro yang pada saat itu sedang kuliah di Fakultas Hukum pada Columbia University mengirimkan sebuah surat kepada Perdana Menteri Ali Sostroamidjojo di Jakarta. Dalam suratnya itu Tiro menuding bahwa Pemerintah Indonesia adalah regim teror, komunis fasis dan telah melakukan genocide terhadap Rakyat Aceh. Tiro meminta supaya kekejaman itu segera dihentikan dan segera berunding dengan para pemberontak kalau tidak dia atas nama Republik Islam Indonesia akan memasukkan perkara ini ke PBB. Dalam kenyataannya Hasan Tiro yang bertindak sebagai perwakilan Republik Islam Indonesia memang tengah berusaha memasukkan persoalan DI/TII ini ke forum PBB dengan tujuan supaya rakyat Aceh diberikan hak menentukan nasib sendiri (self determination), akan tetapi maksud itu menemui kegagalan<sup>59</sup>.

---

59. Lihat Salinan Surat tersebut dalam lampiran. Dikutip dari M.Nur El Ibrahimy, Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh: "Manager" Aceh Daerah Modal Tergolong Penyelamat RI Mengapa Akhirnya Naik Gunung?". Media Dakwah. Jakarta. 2001, hal. 13-17

Namun pada tanggal 15 Maret 1959 sayap militer DI/TII Aceh di bawah pimpinan Kolonel Hasan Saleh dan dua rekannya yakni Ayah Gani dan Husen al Mujahid membelot dari garis komando Abu Beureueh sebagai kepala negara Aceh dan membentuk Dewan Revolusi<sup>60</sup>. Peristiwa pembelotan Kolonel Hasan Saleh cs. dapat dimaknai sebagai upaya pembangkangan dan pemberontakan militer terhadap komando politik sipil di bawah pimpinan Tgk. M. Daud Beureueh.

Dua bulan sepuluh hari setelah Dewan Revolusi terbentuk tercapailah kesepakatan Dewan Revolusi ini dengan Misi Hardi yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Lam Teeh<sup>61</sup>. Yakni perjanjian antara Pemerintah RI yang diwakili Mr. Hardi sebagai wakil Perdana Menteri RI dan Dewan Revolusi Hasan Saleh cs. yang mengatas namakan DI/TII. Aceh. Dari perjanjian inilah lahir sebutan Aceh sebagai Daerah Istimewa. Keistimewaan Aceh itu mencakup tiga bidang; Agama (Islam), budaya, dan pendidikan.

Politik akomodasi Pemerintah Pusat terhadap Aceh melalui kelompok ini juga telah dikaitkan dengan politik identitas Aceh yakni yang berkaitan dengan keislaman, kebudayaan, dan pendidikan. Jadi identitas keacehan telah menjadi tema penting dari rumusan perdamaian itu. Jati diri Orang Aceh atau budaya keacehan yang terkait dengan nilai-nilai Islam telah diakomodir oleh Pemerintah Pusat untuk diurus secara otonom oleh Orang Aceh yang telah mengantarkan perdamaian Dewan Revolusi DI/TII Aceh dengan Pemerintah Pusat dapat dicapai.

---

60. Nur Ibrahimy menyebut Dewan ini bukan sebagai bentuk kudeta kepada Abu Beureueh, melainkan sebetulnya “split” dan pengkhianatan perjuangan. Artinya kelompok DII/TII Aceh terbelah dua yakni kelompok Abu Beureueh dan kelompok Hasan Saleh. Dan yang berdamai dengan RI hanya kelompok Hasan Saleh. Lihat M. Nur El Ibrahimy, Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh: “Manager” Aceh Daerah Modal Tergolong Penyelamat RI Mengapa Akhirnya Naik Gunung?”. Media Dakwah. Jakarta. 2001, hal 200.

61. Disebut Perjanjian Lam Teeh karena perjanjian itu dilakukan di daerah Lam Teeh. Lihat lampiran.

Sebetulnya para pimpinan Dewan Revolusi mengusulkan agar Aceh mempunyai semua kekuasaan, kecuali dalam urusan luar negeri, pertahanan, dan keuangan.<sup>62</sup> Jadi hubungan Aceh dan Jakarta yang hendak dibangun oleh Dewan Revolusi ini adalah hubungan yang bersifat federatif. Sebetulnya konsep tentang Daerah Istimewa Aceh dirumuskan oleh Dewan Revolusi ini merupakan replikasi dari konsep yang telah dirumuskan oleh kelompok Daud Beureueh cs. selama pembicaraan tidak resmi mereka dengan KDMA (Komando Daerah Militer Aceh) pada tahun 1958.<sup>63</sup>

Namun di sisi lain, kelompok yang masih setia dengan Daud Beureueh menyebutkan bahwa kelompok Kolonel Hasan Saleh cs. sebagai pengkhianat yang sedang menjual Aceh kepada Jakarta<sup>64</sup>. Kenyataannya, meskipun perdamaian itu tidak direstui oleh Daud Beureueh sebagai Kepala Negara Aceh, namun peristiwa itu tetap dapat berjalan dan Pemerintah Indonesia tetap bersedia berunding dengan kelompok Kolonel Hasan Saleh cs. Hal dapat dimaknai sebagai strategi dan upaya pelemahan gerakan perlawanan DI/TII Aceh di bawah Daud Beureueh oleh Pemerintah Indonesia.

Serangkaian upaya diplomasi dan negosiasi antara pihak Pemerintah Indonesia dengan pihak DI/TII Aceh di bawah Daud Beureueh telah dijalankan dan disepakati kedua belah pihak. Setelah tiga tahun bertahan di hutan (Mardhatillah<sup>65</sup>) sejak Dewan Revolusi pimpinan Kolonel Hasan Saleh berdamai dengan Pemerintah RI, tepatnya pada tanggal 9 Mei 1962, Tgk. M. Daud Beureueh dengan dijemput oleh pasukan di bawah pimpinan Kolonel Nyak Adam Kamil ”turun gunung”<sup>66</sup>.

---

62. Lihat juga Nazaruddin Syamsuddin dalam *Pemebrontakan Kaum Republik*, Grafiti. Jakarta 1990, hal. 310

63. *Ibid*, hal. 311

64. *Ibid*, hal. 311

65. Mereka menyebut markas mereka dengan Mardhatillah atau tempat yang dirahmati Allah.

66. Lihat M.Nur El Ibrahimi, *Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh: “Manager” Aceh Daerah Modal Tergolong Penyelamat RI Mengapa Akhirnya Naik Gunung?*. Media Dakwah. Jakarta. 2001, hal. 255-256

”Turun gunungnya” Daud Beureueh ini disinyalir karena ia dan pasukannya tidak lagi memiliki kekuatan secara fisik untuk melancarkan perlawanan terhadap Pemerintah RI. Hal ini didasarkan pada argumen, bahwa tidak lama sebelum turun gunung itu, ternyata Beureueh cs. telah memproklamkan Republik Islam Aceh (RIA). Jadi Beureueh sesungguhnya tetap masih melakukan perlawanan terhadap RI, hanya saja belum dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik.

Berkaitan dengan RIA ini, Abu Jihad<sup>67</sup> menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Teungku M. Daud Beureueh dan kawan-kawan pimpinan mujahidin Darul Islam di Aceh, maka diambil jalan pembebasan dan hijrah dengan memproklamkan Republik Islam Aceh yang bebas dari Indos Nesos<sup>68</sup> pada 15 Agustus 1961. Dari sana beliau merencanakan bahwa RIA akan dijadikan sebagai wilayah basis untuk membebaskan Umat Islam dan bangsa-bangsa se-Sumatera dari Indos Nesos hingga Aceh menjadi tapak kekuatan untuk membina ikatan bersama dengan bangsa-bangsa di pulau-pulau yang lain bagi melahirkan Konfederasi Daulah Islamiah Kepulauan Melayu Raya.

---

67. Lihat Abu Jihad, “Gerakan Perjuangan Republik Islam Aceh” dalam

68. Indos Nesos berasal dari kata Yunani lama, Indos dan Nesos yang berarti pulau-pulau India. Dari kata Indos Nesos inilah kemudian seorang ilmuwan Barat Sebastian menemukan kata Indonesia untuk menggantikan kata Hindia Belanda. Jadi sesuai dengan catatan Abu Jihad, gagasan Indonesia atau Indos Nesos atau Hindia Belanda hanyalah gagasan Kaum Imperialis Barat untuk kepentingan penjajahan, penindasan dan pemerkosaan Barat terhadap bangsa-bangsa kita dan menjadi tapak tempat berpijak bagi mengidupkan doktrin salibiyah. Ibid. hal, 133. Bahkan dalam pandangan Hasan Tiro, Indonesia yang diartikannya sebagai kepulauan keling bukanlah sebuah nama bangsa dalam pengertian etnologis, antropologis, folologis dan sejarah. Tetapi hanya merupakan geografis expression belaka. Lihat Isa Sulaiman, “Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Geraka”. Pustaka Alkausar. Jakarta 2000, hal. 15

Berbeda dengan gerakan DI/TII, gerakan RIA ini lebih berorientasi kepada pendirian Negara Republik Islam Aceh sebagai basis gerakan yang terpisah dari Republik Indonesia untuk kemudian melahirkan Konfederasi Daulah Islamiah Kepulauan Melayu Raya. Gerakan Republik Islam Aceh ini memang tidak begitu terkenal kepermukaan karena setahun kemudian yakni pada tahun 1962 Beureueh sendiri telah ikut turun gunung mengikuti langkah temannya di sayap militer DI/TII yang terlebih dahulu menyerah.

Dalam gerakan RIA ini telah kelihatan bahwa Aceh hendak dipisahkan kembali dengan RI. Meskipun gerakan RIA ini tidak sempat muncul kepermukaan secara meluas di kalangan masyarakat Aceh. Tetapi semangat untuk memisahkan Aceh dari RI yang ditanamkan RIA ini menjadi gerakan pertama di Aceh sejak bergabung dengan RI yang bertujuan memisahkan diri dari RI. Hal ini dapat dipandang sebagai basis dari rasionalisasi muncul gerakan perlawanan di Aceh pada periode berikutnya yang juga berkehendak memisahkan diri dari RI yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1976.

Reproduksi tentang identitas keacehan yang Islami selalu menjadi langgam dari setiap perjuangan orang Aceh. hal terlihat dari sejak berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam, perang Aceh dengan Belanda, perang kemerdekaan Indonesia, perang DI/TII Aceh. Islam selalu menjadi instrumen ampuh untuk memobilisasi semangat juang rakyat Aceh dalam semua periode perang Aceh. Mengapa demikian? Hal itu karena atas dasar Islam dan demi Islamlah identitas keacehan itu dibina. Jadi tanpa Islam, Aceh itu sudah tidak ada lagi. Demikianlah kira-kira paham citra diri Orang Aceh berkaitan dengan Islam. Apakah roh Islam masih dapat ditemui dalam perjuangan Aceh Merdeka? Dalam tulisan-tulisan berikut ini pembaca akan dapat menikmatinya.

## F. Gerakan Aceh Merdeka.

Pembahasan tentang GAM di sini memiliki dua maksud. Pertama, hendak ditunjukkan bahwa perlawanan Aceh dalam hal ini GAM, tidak dapat dilepaskan dari rentetan perjuangan orang Aceh di masa silam. Artinya perjuangan GAM ini bukanlah ahistoris. Kedua, mengupas sisi sejarah awal kemunculan GAM secara singkat. Sehingga dapat dipahami kelahiran GAM ini memang masih terkait dengan paham dan tokoh perjuangan Aceh di masa silam. Jadi sebetulnya perjuangan orang Aceh dari masa silam sampai dengan zaman GAM yang berubah hanya aktor, model dan simbol gerakan dan organisasinya saja, sementara roh perjuangannya adalah selalu terkait dengan idiom-idiom Islam yang kemudian dikaitkan dengan negara dan bangsa Aceh yang terus direproduksi sesuai konteks zaman.

Demikianlah, setelah lama tidak terdengar adanya gerakan perlawanan dari Aceh terhadap Pemerintah RI setelah DI/TII dilumpuhkan pada akhir 1950-an sampai awal tahun 1960-an dan RIA tidak menggemma<sup>69</sup>, maka pada 4 Desember 1976 Aceh Merdeka diproklamkan oleh Dr. Hasan Muhammad Di Tiro yang mengaku dirinya selaku pemegang mandat per-Wali-an Aceh yang diserahkan oleh Tuha Peuet Neugara (Madjeulih Neugara<sup>70</sup>) kepada Teungku Chik Di Tiro Muhammad Saman, Pemimpin Perlawanan Aceh terhadap Belanda tahun 1885-1891 yang bergelar al-Mukarram Maulana al Mudabbir al Malik yang kemudian diklaim oleh Hasan Tiro sebagai masih berlaku secara turun temurun bagi keluarga Di Tiro.

---

69. Ada dua kemungkinan mengapa RIA ini tidak menggemma. Pertama mungkin dukungan rakyat yang masih lemah. Karena perang DI/TII Aceh baru saja berakhir. Kedua Beureuah sendiri tahu bahawa gerakan RIA ini tidak akan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Namun ia hanya ingin mewariskan pada generasi muda Aceh bahwa Aceh masih berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hal terkait dengan masa ia memproklamirkan RIA ini pada tahun 1961, ketika ia belum turun gunung dalam perang DI/TII, namun tahun 1962 ia turun gunung.

70. Maksudnya Majelis Negara Aceh. Lihat Naskah “Angkatan Geurakan Adjech Meurdehka” disusun oleh J.M. Hara. Aceh-Sumatra Nasional Liberation Front Departement of Education. BM Box 3294 London. 1999, hal. 8



Kalau ditilik dari garis keluarganya memang bukanlah suatu keanehan kalau Hasan Tiro kemudian tampil memimpin suatu gerakan perjuangan Aceh Merdeka, mengingat dia berasal dari keluarga ulama besar dan syuhada Tiro yang terkenal sangat heriok dari zaman perang sabil Aceh dengan Belanda. Dari garis keturunan pihak ibunya, ia merupakan salah satu cicit kandung Teungku Chik Di Tiro Muhammad Saman yang meruakan anak dari cucunya Teungku Nyak Phatimah binti Teungku Mahyuddin bin Teungku Chik Di Tiro Muhammad Saman (1826-1891). Bahkan Hasan Tiro sebagaimana yang ditulis dalam buku diarilya<sup>71</sup> menganggap keterlibatannya dalam memimpin perjuangan Aceh Merdeka merupakan panggilan zaman bangsanya dan takdir Allah yang wajib diemban karena ia adalah keluarga Syuhada Tiro.

Menurut Hasan Tiro, sejak saat itu yakni sejak Tuha Peuet Neugara (Madjeulih Neugara<sup>72</sup>) menyerahkan mandat per-Wali-an negara Aceh kepada Teungku Chik Di Tiro Muhammad Saman sebagai Pemimpin Perlawanan Aceh terhadap Belanda tahun 1885-1891 yang bergelar al-Mukarram Maulana al Mudabbir al Malik, maka kekuasaan negara Aceh beralih ke tangan keluarga Di Tiro secara estafet<sup>73</sup>.

---

71. Lihat Teungku Hasan Muhammad Di Tiro, *The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Teungku Hasan Di Tiro*. NLFAS. 1984, hal. 1

72. Lihat Naskah “Angkatan Geurakan Adjeh Meurdehka” disusun oleh J.M. Hara. *Acheh-Sumatra Nasional Liberation Front Departement of Education*. BM Box 3294 London. 1999, hal. 8

73. Lihat Naskah “Seu-eue dan Djeunaweueb dalam Peukara Peurdjuangan” dalam “Angkatan Geurakan Adjeh Meurdehka” disusun oleh J.M. Hara. *Acheh-Sumatra Nasional Liberation Front Departement of Education*. BM Box 3294 London. 1999, hal. 2

Lihat juga Isa Sulaiman, “Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Geraka”. Pustaka Alkausar. Jakarta 2000, hal. 16.

Karena sejak Teungku Maat Di Tiro syahid di tangan Belanda tanggal 3 Desember 1911 kepemimpinan perjuangan atas nama negara Aceh telah terhenti. Sehingga sudah menjadi kewajibannya sebagai keturunan Di Tiro untuk memimpin kelanjutan perjuangan itu. Maka diambilnya tanggal 4 Desember 1976 itu sebagai titik awal untuk melanjutkan kembali perjuangan yang telah terhenti pada 3 Desember 1911 bukanlah sebagai suatu kebetulan.

Hasan Tiro yang dilahirkan di Tanjong Bungong, Lamlo, Pidie pada 1923, seorang doktor ilmu hukum dan deklarator Aceh Merdeka sejak tahun 1950 sudah menetap di Amerika Serikat dalam rangka menyelesaikan studinya di Colombia University sekaligus bekerja di kantor perserikatan bangsa-bangsa (PBB)<sup>74</sup>

Pada tahun 1954, setahun setelah DI/TII Aceh diproklamkan oleh Teungku M. Daud Beureueh, anak didik Teungku M. Daud Beureueh ini telah menempati posisinya sebagai Duta Besar Negara Islam Indonesia untuk PBB dan AS. Sebelumnya, sambil kuliah di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, tokoh ini, atas rekomendasi Teungku M. Daud Beureueh bahkan pada tahun 1949-1951 pernah bekerja di kantornya WKPM Syafruddin Prawiranegara ketika Ibu Kota RI berada di Yogyakarta, Padang dan di Banda Aceh. Atas rekomendasi WKPM Syafruddin pula kemudian Hasan Tiro dan dua rekannya Ilyas Ismail dan Harun Ali memperoleh beasiswa Colombia Plan untuk kuliah di Colombia University AS. Sambil kuliah di Colombia University, Hasan Tiro juga bekerja di bagian Penerangan Perwakilan Tetap RI di PBB<sup>75</sup> hingga ia mengambil posisinya sebagai Dubes NII untuk PBB dan AS pada September 1954 setelah sebelumnya mengirim surat kecaman terbukanya kepada Perdana Menteri RI Ali Sastro Amidjojo.<sup>76</sup>

---

74. Lihat Nazaruddin Syamsuddin, "Integrasi Politik di Indonesia". Gramedia. Jakarta 1989, hal. 70-71

75. Lihat Isa Sulaiman, "Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Geraka". Pustaka Alkautsar. Jakarta 2000, hal. 12

76. Lihat M.Nur El Ibrahimy, Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh: "Manager" Aceh Daerah Modal Tergolong Penyelamat RI Mengapa Akhirnya Naik Gunung?". Media Dakwah. Jakarta. 2001, hal. 13-17

Gerakan Aceh Merdeka<sup>77</sup> itu sendiri adalah sebuah gerakan untuk melepaskan Aceh dari wilayah Indonesia dan menjadikan Aceh berdiri sendiri sebagai sebuah negara merdeka. Berbeda dari gerakan-gerakan sebelumnya yang lebih menonjolkan Islam sebagai simbol gerakan dan ulama sendiri sebagai pusat penggerak. Gerakan Aceh Merdeka ini menariknya adalah bahwa keterlibatan ulama dayah tidak lagi sebagai sentral gerakan, bahkan yang menjadi tokoh-tokoh utamanya adalah dari kalangan sarjana dengan terutama mendapatkan pendidikan model Barat. Syamsuddin<sup>78</sup> menyebut GAM itu awalnya adalah gerakan sekelompok intelektual muda Aceh. Sebutan intelektual dan bukan ulama ini didasarkan pada kenyataan bahwa para tokoh-tokohnya itu terdiri dari para dokter, insinyur, mister (Mr.) dan doktor<sup>79</sup>. Fenomena ini tidak serta merta kemudian mengabaikan sama sekali makna Islam bagi suatu perjuangan Aceh. Islam justru lebih ditempatkan sebagai sesuatu yang bersifat ruhiah daripada formalis.

Di antara tokoh-tokoh GAM yang patut disebut sebagai deklaratornya adalah pertama dan terutama Dr. Muhammad Hasan Di Tiro yang memegang jabatan sebagai kepala negara Aceh/ Wali Negara Aceh. Kedua, para pimpinan yang memiliki jabatan sebagai meuntroe (menteri) yakni dr. Mukhtar J. Hasbi, HD, DTM&H (menjabat menteri dalam negeri), dr. Husaini Hasan (menjabat menteri pendidikan dan kebudayaan), dr. Zaini Abdullah, M.D. (menjabat menteri kesehatan), dr. Zubir Mahmud, M.D. (menjabat menteri sosial), Ir. Teuku Asnawi Ali, Dipl. Ing. (menjabat menteri pembangunan dan pekerjaan umum), Mr. Amir Ishak (menjabat menteri penerangan), Mr. A.R. Mahmud (menjabat menteri perdagangan), Mr. H. M. Mahmud (menjabat menteri negara dan perwakilan di PBB), Teungku Muhammad Usman (menjabat menteri keuangan), Teungku Haji Ilyas Leube (menjabat menteri keadilan).

---

77. Dalam versi inggrisnya mereka menyebut gerakannya dengan Aceh Sumatran National Liberation Front (ASNLF atau NLFAS)

78. Lihat Nazaruddin Syamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia*. Gramedia. Jakarta. 1989, hal, 70

79. Lihat tabel struktur kepemimpinan GAM.

Struktur juru da'wah GAM yang sampai tahun 2005 terdiri dari 40 orang diseluruh Aceh merupakan salah satu elemen terpenting dalam perjuangan GAM terutama untuk menyampaikan gagasan-gagasan berkaitan dengan perjuangan GAM.<sup>80</sup> Simbolisasi struktur ini tidak saja karena sebutannya juru dakwah tetapi sekaligus juga di isi oleh orang-orang yang dikenal sebagai tokoh agama kelas menengah telah memiliki tendensi islami bagi masyarakat umum di Aceh. Mereka umumnya bertugas memberi memberi nasehat kepada anggota GAM di lapangan, menyampaikan keterangan tentang perjuangan Aceh Merdeka kepada masyarakat umum di Aceh dan membai'at (sumpah setia) kepada anggota baru GAM. Perekrutan anggota baru GAM biasanya terjadi melalui jaringan pertemanan, kekeluargaan, kerabat setempat tinggal, dan tentu melalui ceramah dan penyebaran tulisan-tulisan tentang perjuangan GAM.

Pendanaan perjuangan GAM terutama mengandalkan sumbangan masyarakat dan apa yang mereka sebut sebagai pajak nanggroe (pajak negara) yang dikutip dari masyarakat, baik dalam bentuk suka rela maupun paksaan. Hal ini didasarkan pada pemahaman mereka tentang adanya kewajiban bangsa terhadap perjuangan negara karena hendak menegakkan deelat Allah (kedaulatan Allah). Dalam satu risalah mereka mengatakan bahwa ketika bangsa Aceh masih dalam perjuangan untuk menegakkan deelat Allah, ada kewajiban bangsa untuk membantu perjuangan suci ini yang dilakukan melalui pemberian seuneh zakeut (bagian zakat) untuk hak fisabilillah (perjuangan di jalan Allah), infaq atau sedekah (kewajiban orang kaya untuk membantu perang sabilillah), harta waqaf, hibbah.<sup>81</sup>

---

80. Informasi ini penulis peroleh dari salah seorang juru da'wah GAM Teungku Aleh Ba di Lhokseumawe pada bulan September 2008.

81. Lihat Naskah Neuduek Adjeh – Sumatra disusun oleh J.M.Hara. Aceh-Sumatra Nasional Liberation Front Departement of Education. BM Box 3294 London. 1999, hal. 5


Mengenai bentuk dasar negara Aceh yang hendak didirikan oleh pihak GAM itu pun tidak lagi menonjolkan simbol-simbol Islam secara formalistik dan kentara. Meskipun begitu melihat dari simbol bulan bintang yang tertera pada bendera perjuangan Aceh Merdeka, semua orang dapat memahami bahwa bulan bintang merupakan simbol politik Ummat Islam.<sup>82</sup> Demikian juga dengan reproduksi simbol-simbol Islam sebagaimana disebutkan di atas orang dapat mengambil kesimpulan bahwa mereka memang hendak mendirikan negara yang didasarkan pada spirit keIslaman di Aceh, meskipun mereka tidak menyebutkan dengan nama itu. Menurut mereka tanpa menyebutkan Islam pun semua orang juga telah memahami bahwa Aceh itu Islam.

Apalagi melihat bahwa Hasan Tiro menyadari betul bahwa restu sang guru, Teungku M. Daud Beureueh (yang dikenal sebagai seorang ulama kharismatik dan pejuang politik Islam) sangatlah penting untuk menopang gerakannya. Sebagai seorang pemimpin pejuang kharismatik Beureueh memang masih memiliki banyak pengikut yang berpengaruh. Dalam catatan Syamsuddin, suatu ketika di akhir tahun 1975 Hasan Tiro menemui sang gurunya itu di rumahnya di Beureunuen, Aceh. Dalam pertemuan itu terjadi diskusi yang panjang tentang dasar negara Aceh Merdeka yang hendak diperjuangkan Hasan Tiro. Dalam diskusi itu, intinya Daud Beureueh menekankan bahwa kalau dasar Negara Aceh Merdeka yang hendak dibentuk itu adalah Islam, maka dia akan mendukungnya karena menurut Beureueh yang dibutuhkan Aceh itu Islam bukan merdeka. Namun setelah satu jam mereka diskusi sang murid pun mampu meyakinkan gurunya bahwa Orang Aceh memang memerlukan juga kemerdekaan. Akhirnya Daud pun mengangguk memberi restu.<sup>83</sup>

---

82. Lihat lampiran.

83. Lihat Tempo, Dalam Sangkar Emas Republik. Edisi 18-24 Agustus 2003.




Bicara tentang falsafah negara atau ideologi, Hasan Tiro sebenarnya secara substansi mempunyai pandangan yang sama dengan gurunya itu, sebagaimana yang telah dipublikasikannya pada 1965<sup>84</sup> ketika ia mengatakan bahwa Pancasila bukanlah suatu filsafat, bukan pula suatu ideologi yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu ia berpendapat bahwa Islamlah yang harus dijadikan falsafah atau ideologi negara karena ia hidup dan berakar dalam masyarakat Indonesia. Dengan mengakui Islam sebagai sebagai dasar Persatuan Indonesia, lanjutnya, tidak berarti agama lain akan disisihkan. Bagi Tiro suatu ideologi itu merupakan sesuatu yang secara sosiologis telah dianut dan hidup dalam suatu masyarakat sebagai pandangan hidupnya, sebagai pedomannya. Dengan demikian, ideologi suatu bangsa bagi Tiro hanya dapat ditemukan dan dirumuskan dalam kerangka pandangan hidup dan pendoman hidup yang telah dipraktekkan suatu masyarakat yang terutama sangat ditentukan oleh suatu sistem kepercayaan. Sehingga menurut Tiro, bagi Ummat Islam ideologi politiknya adalah sudah jelas harus didasarkan pada Islam.

Tentang dukungan Teungku M. Daud Beureueh bagi GAM semakin hari semakin kelihatan. Secara diam-diam ia memang telah memberikan dukungan terhadap GAM dengan menghimbau para pemimpin lokal untuk mendukung GAM<sup>85</sup>. Dukungan itu semakin kentara manakala secara terang-terangan bahkan para mantan pimpinan DI/TII Aceh lainnya seperti Ilyas Lebe'e, Daud Pane'uk dan Pawang Rasyid malah terlibat langsung sebagai pimpinan-pimpinan Gerakan Aceh Merdeka. Dukungan politik yang diberikan Daud Beureueh bagi GAM merupakan suatu modal sosial yang sangat besar bagi Tiro dalam mengkampanyekan dan memobilisasi gerakan Aceh Merdeka mengingat Daud Beureueh dalam masyarakat Aceh pada waktu itu sebagai tokoh yang sangat dipercaya dan disegani oleh masyarakat Aceh.

---

84. Lihat Isa Sulaiman, "Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Geraka". Pustaka Alkausar. Jakarta 2000, hal. 14

85. Lihat Hasan Saleh, "Mengapa Aceh Bergolak". Grafiti. Jakarta 1992



Dalam sebuah kesempatan perjamuan di Mesjid Beureunuen, tulis Abu Jihad<sup>86</sup>, Teungku M. Daud Beureueh mengumpulkan seluruh pengikutnya untuk bertemu Hasan Tiro dan bersalaman dengannya satu persatu. Hal itu merupakan pertanda dari Abu Beureueh bahwa bila kelak beliau meninggal inilah kira-kira penggantinya. Kemudian setelah beberapa bulan terbentuknya GAM, pada hari Jumat bulan Mei 1977, dalam suatu Khutbah Jum'at, Abu Beureueh mengatakan "kita sekarang telah ada pemerintahan sendiri, kita telah ada pemimpin sendiri, yaitu di bawah pimpinan Teungku Muhammad Hasan Di Tiro yang baru saja diumumkan, maka oleh sebab itu kita mengikutinya dan haram mencelanya". Bahkan ketika ada yang melapor kepada Abu Beureueh bahwa pembentukan Pemerintahan Aceh Merdeka tanpa unsur Syariat Islam di dalamnya, lalu Abu menjawab "itu hanya sebagai taktik yang digunakan oleh si Nyak Hasan".

Kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh Daud Beureueh kepada Hasan Tiro dan perjuangan Aceh Merdeka merupakan garansi yang tidak saja sangat menguntungkan perjuangan mereka karena Abu adalah seorang tokoh panutan rakyat dalam kepolitikan Aceh pada waktu itu, tetapi juga menandakan bahwa perjuangan Aceh Merdeka yang dipimpin Hasan Tiro itu adalah puncak dari diputuskannya hubungan politik antara Aceh dan Indonesia yang dulunya juga dirajut oleh Abu Beureueh. Dengan demikian kalau apa yang dilakukan oleh Abu Beureueh pada waktu menggabungkan Aceh dengan Indonesia dianggap sebagai sesuatu yang sudah sah, maka logika yang sama mestinya juga berlaku ketika dia mengatakan Aceh sekarang telah memiliki pemerintahan sendiri dan kita wajib menta'atinya. Namun masalahnya dalam politik, bukan hanya bicara sah atau tidak sah, tetapi juga bicara tentang kekuatan apa yang dimiliki untuk mendukung sesuatu yang dianggap sah atau tidak sah itu. Jadi dalam kepolitikan bukan bicara benar dan salah, tetapi bicara menang dan kalah.

---

86. Lihat Abu Jihad, "Pemikiran-pemikiran Politik Hasan Tiro" Titian Ilmu Insani. 2000, hal. 80

Pemerintah RI pun memahami hal ini, sehingga dengan kekuasaan yang dimiliki akhirnya Pemerintah Orde Baru mengambil kebijakan “menjemput paksa” Abu Beureueh pada 1 Mei 1978 untuk kemudian “ditawan” dalam sebuah rumah mewah di Jakarta. Karena Jakarta khawatir betul kalau sampai Abu “naik gunung” lagi. Logikanya adalah legenda hidup itu harus dipisahkan dari Hasan Tiro, Gerakan Aceh Merdeka dan rakyat Aceh karena sesungguhnya Abu masih memiliki roh perlawanan Aceh<sup>87</sup>. Logika ini sejalan dengan nasehat Hurgronje kepada Pemerintah Kolonial Belanda untuk memisahkan ulama Aceh dengan rakyat Aceh di masa Aceh berperang melawan Kolonial Belanda tempo dulu<sup>88</sup>.

Sebelum pertemuannya di Beureunuen pada 1975 itu, ternyata Hasan Tiro dan Daud Beureueh juga pernah bertemu di Amerika Serikat pada pertengahan 1971. Dalam pertemuan itu telah dibicarakan tentang gagasan hak menentukan nasib sendiri Bangsa Aceh-Sumatra. Akan tetapi mengingat dirinya sudah uzur, Beureueh justru mengharapkan Hasan Tirolah yang dapat merealisasikan ide tersebut. Hal yang sama juga disampaikan Hasan Tiro kepada abangnya, Teungku Zainal Abidin Tiro ketika melawat ke AS<sup>89</sup>. Melihat dari fakta ini, Beureueh sesungguhnya adalah salah satu roh dari perjuangan Aceh Merdeka.

---

87. Lihat Tempo, Dalam Sangkar Emas Republik. Edisi 18-24 Agustus 2003.

88. Buku itu diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dengan judul “Aceh Di Mata Kolonialis” oleh Ng. Singarimbun dkk. Diterbitkan oleh Yayasan Soko Guru 1985.

89. Lihat Isa Sulaiman, “Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Geraka”. Pustaka Alkausar. Jakarta 2000, hal. 18



Dalam satu surat Daud Beureueh yang ditulis dalam Bahasa Aceh Arab (Arab Jawoe) pada tanggal 10 Jumadil Awwal 1397 H (29 April 1977 M) yang ditujukan kepada bangsa Aceh dengan tajuk di pangkal surat "Amanah Keu Bangsa Aceh"<sup>90</sup>, selanjutnya ia mengatakan bahwa Aceh merupakan negara berdaulat di permukaan bumi ini.<sup>91</sup> Sebagai seorang pemimpin dan ulama kharismatik Aceh, Beureueh memang memiliki legitimasi dan pengaruh yang kuat untuk ketika mengatakan hal semacam itu, apalagi mengingat dialah dulunya sebagai tokoh utama yang telah menggabungkan Aceh ke Indonesia yang pada waktu itu dianggapnya sebagai negara yang akan didasarkan pada ideologi Islam. Dengan demikian meminjam Reid, ada kesesuaian tujuan historis antara Aceh dan Indonesia. Namun kemudian hari Beureueh memandang bahwa Indonesia gagal menempatkan posisi politik pada jalur ibadah. Bahkan ia menilai Indonesia yang dimerdekakan oleh Ummat Islam telah menjadi sarang jinayah.<sup>92</sup>

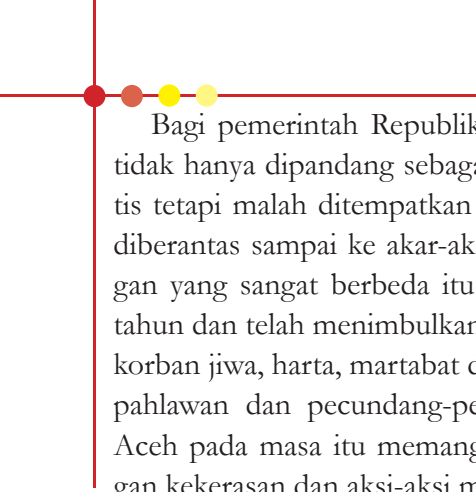
Bagi para pejuang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka, gerakan ini adalah perjuangan nanggroe seunambong (successor state), gerakan untuk melanjutkan perjuangan yang telah terhenti pada 3 Desember 1911 yang hendak menyelamatkan ideologi Aceh, mengembalikan hak bangsa Aceh dan kedaulatan Negara Aceh yang sudah teraneksasi oleh Belanda dan dilanjutkan Republik Indonesia. Itulah hak bangsa Aceh menurut GAM. Karena perjuangan GAM dipahami sebagai perjuangan sambungan dari perjuangan syuhada Aceh di masa lalu, maka darah dan roh Islam adalah sesuatu yang terus mengalir dalam irama perjuangannya. Karena dalam Islamlah identitas keacehan menapakkan dirinya sebagaimana telah ditunjukkan di atas.

---

90. Artinya amanah untuk bangsa Aceh.

91. Lihat Hasanuddin Yusuf Adan, Eteungku Muhammad Daud Beureueh: Pemimpin Kharismatik dan Ulama Pembaharu dalam Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh oleh Tim Penulis IAIN Arraniry. Arraniry Press. Bannda Aceh. 2004, hal. 170

92. Ibid. Jinayah adalah sesuatu tindakan yang berkaitan dengan dosa dalam pandangan Islam.



Bagi pemerintah Republik Indonesia, Gerakan Aceh Merdeka itu tidak hanya dipandang sebagai sebuah gerakan pemberontakan separatis tetapi malah ditempatkan sebagai pengacau keamanan yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Begitulah dua perbedaan pandangan yang sangat berbeda itu telah bersiteru sampai dengan puluhan tahun dan telah menimbulkan banyak kekerasan dan memakan banyak korban jiwa, harta, martabat dan tentu saja telah melahirkan pahlawan-pahlawan dan pecundang-pecundang dalam makna masing-masing. Aceh pada masa itu memang telah menjadi daerah yang penuh dengan kekerasan dan aksi-aksi militer akibat dari adanya aksi dan ekspresi politik yang dilakukan oleh sebagian orang Aceh yang tergabung dalam perjuangan Aceh Merdeka yang direspon dengan cara militeristik oleh rezim Orde Baru Pemerintah RI.

Namun ternyata takdir berkehendak lain, pertengahan tahun 2005, enam tahun setelah sejak perjuangan SIRA dan elemen sipil lainnya menuntut diadakannya referendum untuk menentukan sikap rakyat Aceh, memilih merdeka atau tetap bergabung dengan RI dan 30 tahun setelah para pejuang Aceh Merdeka malang-melintang suka dan duka di belantara, di kota, dan di luar negeri, setelah gelombang tsunami menghantam Aceh pada 26 Desember 2004, maka pada 15 Agustus 2005 setelah melalui perundingan yang berat dengan difasilitasi oleh CMI, sebuah lembaga internasional pimpinan mantan Presiden Finlandia Marthi Ahtisari, ujung riwayat perjuangan GAM dinoktahkan dalam Nota Kesepahaman atau nota damai (MOU) antara RI dan GAM yang ditandatangani di Helsinki Finlandia<sup>93</sup>.

---

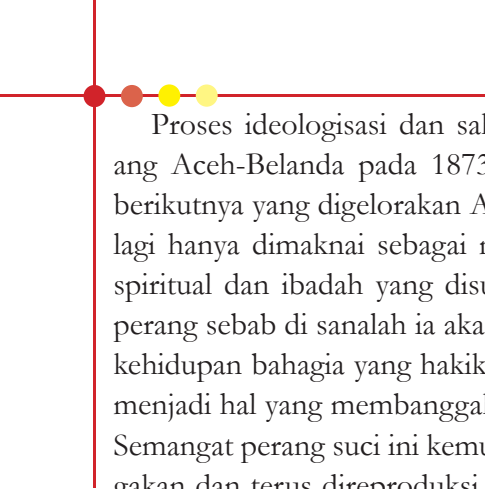
93. Lihat Salinan Naskah MoU Helsinki antara RI dan GAM. 2005

## G. Kesimpulan

Kemampuan mereproduksi identitas Aceh yang islami telah terbukti dapat menjadi magnet bagi rakyat Aceh untuk memberikan dukungan mereka dalam empat perang Aceh. Wujud dukungan yang diberikan kemudian pun tidak saja dalam bentuk material tetapi lebih penting adalah dalam wujud nyawa dan darah. Pengorbanan yang diberikan dipahami sebagai suatu wujud pelaksanaan kewajiban sebagai orang Aceh.

Politik identitas keacehan yang dikonsepsikan sebagai Islami tidak saja selalu menjadi arena kontestasi dalam setiap periode perang dan kepolitikan Aceh tetapi Islam selalu dijadikan sumber legitimasi dan energi sosial politik untuk mendulang dukungan rakyat Aceh dalam mendukung setiap gagasan perlawanan Aceh.

Reproduksi tentang paham identitas Aceh yang islami selalu terlihat dan ditonjolkan dalam empat perang yang dijalankan Aceh dan bahkan; perang Aceh-Belanda, perang dalam revolusi fisik kemerdekaan Indonesia di Aceh, perang Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Aceh dan perang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Islam dan proses islamisasi yang sudah berusia sekitar 1300 tahun di tanah Aceh selalu menjadi instrumen ampuh untuk memobilisasi semangat juang rakyat Aceh dalam semua periode perang Aceh. Hal ini didasarkan pada asumsi atas dasar Islam dan demi Islamlah identitas keacehan itu dibina, dibela dan dipertahankan. Jadi tanpa Islam, Aceh tidak ada dan tentu saja mudarnya Islam sekaligus juga mudarnya Aceh. Islam sebagai pembentuk kesadaran identitas keacehan yang paling utama kemudian telah menjadi jati diri dan citra diri Orang Aceh sekaligus juga menjadi harga diri Orang Aceh telah direproduksi sebagai daya dorong dan energi sosial politik utama bagi setiap perjuangan dan perang Aceh.



Proses ideologisasi dan sakralisasi perang telah dimulai sejak perang Aceh-Belanda pada 1873 terus direproduksi dalam tiga perang berikutnya yang digelorkan Aceh. Dalam setiap periode, perang tidak lagi hanya dimaknai sebagai membela negeri tetapi menjadi perilaku spiritual dan ibadah yang disucikan. Kematian justru menjadi tujuan perang sebab di sanalah ia akan mejadi syhada Allah untuk mendapat kehidupan bahagia yang hakiki. Berperang dalam makna ini kemudian menjadi hal yang membanggakan bagi kesadaran sebagai Orang Aceh. Semangat perang suci ini kemudian menjadi kenangan yang membanggakan dan terus direproduksi baik pada perang Aceh dalam membela kemerdekaan Indonesia, perang DI/TII Aceh dan perang GAM.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Jihad, “Gerakan Perjuangan Republik Islam Aceh” dalam “Pemikiran-pemikiran Politik Hasan Tiro” Titian Ilmu Insani. 2000.

Anthony Reid, Perlawanan Dalam Sejarah Nanggroe Aceh Darussalam. Tempo Edisi 18-24 Agustus 2003.

Daniel Dhakidae, Aceh dan Papua, Dua Masalah Kompleks Dua Jenis Tawaran Penyelesaian. Kata Pengantar dalam Aceh, Papua, Jakarta: Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik. YAP-PIKA. Jakarta 2001.

Denys Lombard, “Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)”. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). Jakarta 2007.

Dhuroruddin Mashad dalam “Akar Konflik Politik Islam Indonesia”. Pustaka Al-Kausar. Jakarta 2008.

Fukuyama, Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran. Qalam. Yogyakarta 2002

Hasan Saleh “Revolusi Islam di Indonesia” dalam M. Nur el Ibrahimi “Peranan Teungku M. Daud Beureueh dalam Pergolakan Di Aceh”. Media Dakwah. Jakarta. 2001.

Hasan Saleh, “Mengapa Aceh Bergolak”. Grafiti. Jakarta 1992

Hasanuddin Yusuf Adan, Eteungku Muhammad Daud Beureueh: Pemimpin Kharismatik dan Ulama Pembaharu dalam Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh oleh Tim Penulis IAIN Arraniry. Arraniry Press. Banda Aceh. 2004.

Ibrahim Alfian, “Refleksi tentang Gempa-Tsunami: Kegemilangan dalam Sejarah Aceh. Dalam Aceh Kembali ke Masa Depan”. Jakarta: IKJ Press, 2005.

Ibrahim Alfian ”Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah”. Pusat Dokumentasi Aceh. Banda Aceh. 1999. James T. Siegel, The Rope of God. University of Michigan Press. 2000.

Ibrahim Alfian, dkk, Perang Kolonial Belanda Di Aceh. Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. 1997.

Isa Sulaiman, Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1997.

Isa Sulaiman, "Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan". Pustaka Alkaurus. Jakarta 2000.

M. Junus Melalatoa, Memahami Aceh: Sebuah Perspektif Budaya dalam Aceh: Kembali Ke Masa Depan. IKJ Press. Jakarta 2005.

M.Nur El Ibrahimy, Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergerakan Aceh: "Manager" Aceh Daerah Modal Tergolong Penyelamat RI Mengapa Akhirnya Naik Gunung?". Media Dakwah. Jakarta. 2001.

Naskah "Angkatan Geurakan Adjeh Meurdehka" disusun oleh J.M. Hara. Aceh-Sumatra Nasional Liberation Front Departement of Education. BM Box 3294 London. 1999.

Naskah "Seu-eue dan Djeunaweueb dalam Peukara Peurdjuangan" dalam "Angkatan Geurakan Adjeh Meurdehka" disusun oleh J.M. Hara. Aceh-Sumatra Nasional Liberation Front Departement of Education. BM Box 3294 London. 1999.

Naskah Neuduek Adjeh – Sumatra disusun oleh J.M.Hara. Aceh-Sumatra Nasional Liberation Front Departement of Education. BM Box 3294 London. 1999.

Naskah MoU Helsingki antara RI dan GAM. 2005

Nazaruddin Syamsuddin, "Integrasi Politik di Indonesia". Gramedia. Jakarta 1989.


Nazaruddin Syamsuddin, Revolusi di Serambi Mekah, UI Press. Jakarta. 1999.

Nazaruddin Syamsuddin dalam Pemebrontakan Kaum Republik, Grafiti. Jakarta 1990.

Ng. Singarimbun dkk, "Aceh Di Mata Kolonialis". Yayasan Soko Guru 1985.

Paul van 't Veer, Perang Belanda di Aceh. Dinas P dan K DI. Aceh. Banda Aceh 1977.

Salinan Naskah, Maklumat Ulama Seluruh Adjeh. Kutaradja 15-10-1945.



Swiditono, Bung Karno: Negara Nasional dan Cita-Cita Islam. PT. Visi Gagasan Komunka. Depok. 2007.

Taufik Abdullah, Pejuang Kemerdekaan yang Berontak. Tempo Edisi 18-24 Agustus 2003.

Taufik Abdullah dalam Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta 1987.

Teungku Hasan Muhammad Di Tiro, The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Teungku Hasan Di Tiro. NLFAS. 1984.

Tempo, Dalam Sangkar Emas Republik. Edisi 18-24 Agustus 2003.